

50

SEJARAH PERKEMBANGAN
PEKERJAAN UMUM DI INDONESIA

OLEH
Ir. IRDAM IDRIS

Departemen Pekerjaan Umum
dan Tenaga Listrik
PERPUSTAKAAN

657/091 Dep. P. U. & T. L.
Xo

SE D J A R A H .

PER K E M B A N G A N P E K E R D J A A N U M U M

D I I N D O N E S I A

Oleh :

IR. IRDAM IDRIS.

P R A K A T A

Usaha penulisan tjatatan-tjatatan dalam bidang Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik berupa "Sedjarah Perkembangan Pekerdjaan Umum di Indonesia" oleh Sdr. Ir. Irdam Idris ini adalah hal jang patut diketahui oleh para warga Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik; tidak sadja sebagai bahan pengetahuan melainkan djuga sebagai bahan untuk usaha-usaha penjempurnaan Departemen dikemudian hari.

Maka dengan senang hati Institut Pendidikan Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik menerbitkan naskah ini untuk disebarkan lewat berbagai forum pendidikan Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik maupun lewat forum-forum lain jang kiranya memerlukannya.

Tanpa menilai isi dari naskah ini, agaknya Sdr. Ir. Irdam Idris adalah seorang jang tjukup mengetahui sedjarah perkembangan Departemen selaku pedjabat dipusat dan kemudian selaku Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Sumatera Tengah.

Meskipun demikian, lewat djalan ini kami meneruskan adjakan penulis untuk melengkapi, menjempurnakan dan menjambung uraian-uraiannya .-

Direktur Institut Pendidikan
Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik.

t.t.d.

(Ir. Soefaet).

Djakarta, Maret 1970 .-

I s i :

	hal.
Kata Pengantar.	1
Pendahuluan.	2
I. Keadaan pada djaman kolonial Belanda (Ned. Indië).	3
II. Keadaan pada djaman pendudukan Djepang.	10
III. Keadaan pada djaman Indonesia Merdeka.	12
1. Phase 1945 - 1949.	12
2. Phase 1949 - 1950.	18
3. Phase sesudah 1950.	25

KATA PENGANTAR

Uraian mengenai „Sedjarah perkembangan Pekerdjaan Umum di Indonesia" dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta ichtisar tentang tugas, wewenang serta organisasi dari Pekerdjaan Umum terutama kepada mereka jang bertugas dilingkungan Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik, baik tenaga2 lama maupun tenaga2 pendatang baru.

Disamping itu uraian ini dapat pula dimanfaatkan oleh instansi2 Pemerintah lainnja, jang dalam pelaksanaan tugas masing2 erat berhubungan dengan instansi2 Pekerdjaan Umum.

Ketjuali tertjantum dalam peraturan2, keputusan2 resmi serta laporan2 Pemerintah jang terpentjar, hingga sekarang belum pernah disusun suatu ichtisar jang menjimpulkan masalah atau soal2 tentang Pekerdjaan Umum.

Karena perkembangan organisasi serta kegiatan2 Pekerdjaan Umum sangat dipengaruhi oleh situasi serta kebidjaksanaan dari suatu Pemerintahan, dalam uraian ini disinggung pula perkembangan Pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa.

Uraian ini memberikan ichtisar keadaan sampai achir tahun 1969. Kekurangan data2 menjebabkan ketidak lengkapannya. Karena itu kepada para peminat P.U. dipersilahkan melengkapi dan menjempurnakannya dan kepada generasi P.U. jang akan datang, menjambungnja.

Mudah-mudahan ichtisar ini dapat memberikan bahan2 serta dorongan kepada para peminat Pekerdjaan Umum untuk meningkatkan fungsi Pekerdjaan Umum sebagai salah sat unsur pelaksana dalam pembangunan tanah air.

Djakarta, 25 September 1969.-


(Ir. IRDAM IDRIS).-

Pendahuluan.

Istilah „Pekerdjaan Umum!“ sebenarnja adalah terdjemahan dari istilah bahasa Belanda „Openbare Werken“ dan baru dipergunakan atau dipakai setjara resmi semendjak thn. 1942, sewaktu wilajah Indonesia (dahulu Nederlands Indië/Hindia Belanda) diduduki oleh Pemerintah Djepang. Pihak Pemerintah pendudukan Djepang mempergunakan istilah Djepang, jaitu „Doboku“.

Apa jang dimaksudkan dengan „Pekerdjaan Umum“, sebagian besar diambil dari pengertian jang diberikan oleh Pemerintah kolonial Belanda/Pemerintah Ned. Indië kepada istilah „Openbare Werken“, jaitu pekerdjaan2 atau hal2 jang menjangkut dengan :

- a. Djalan raya/umum, djembatan, pengawasan/pengamanan lalu lintas.
- b. Irrigatie (pengairan di sawah2), assainering (penjaluran air berlebih/tergenang untuk kepentingan kesehatan), riolering, waterleiding (air minum).
- c. Landsgebouwen (Bangunan gedung2/rumah2 Negara/Pemerintah) ketjuali jang diurus oleh atau diserahkan pengurusannja pada instansi Pemerintah lainnja (Militer, Perusahaan Kereta Api, Kehutanan dll.).
- d. Pengaturan openbare wateren (perairan umum), pengendalian aliran sungai, zeegaten (muara/kuala), danau dan bronnen (mata air).
- e. Waterkracht dan kelistrikan (pembangkitan tenaga air untuk listrik).
- f. Lapangan terbang sipil.
- g. Bangunan2 pelabuhan, kaden, steigers (dermaga).

Untuk pembinaan (pembangunan, pemeliharaan) dari pekerdjaan2 tsb. diatas dibentuk suatu badan atau organisasi pelaksana.

/Bentuk ...

Bentuk organisasi ini, kebidjaksanaan serta ketentuan2 tentang pembinaan pekerdjaan2 tsb., erat sekali hubungannya dengan struktur Pemerintahan dalam periode kekuasaannya. Berikut ini diuraikan keadaan serta perkembangan dari Pe-kerdjaan Umum, dalam arti kata organisasi pembina dari pekerdjaan2 jang tertjantum diatas, dari masa ke masa semen-djak djaman kolonial Belanda.

I. Keadaan pada djaman kolonial Belanda (Ned.Indië).

Apabila diambil patokan, keadaan pada sekitar tahun 1940, maka struktur organisasi/Pemerintah Ned.Indië dapat disim-pulkan sbb.:

Sebagai kolonie (daerah djadjahan) dari Nederland, opperbes-tuur (pemerintah tertinggi) di Ned.Indië dipegang oleh Ra-dja/Ratu dan algemeen bestuur (pemerintahan umum) didjalan-kan oleh Gouverneur Generaal atas nama Radja/Ratu. Pusat pemerintahan Ned.Indië berada di Batavia (sekarang Djakar-ta), dimana terdapat departemen2, diantaranya ada jang ber-ada diluar Djakarta.

Setjara administratif wilajah Ned.Indië dibagi atas 3 Pro-pinsi (Provincie West Java, Midden Java, Oost Java) dan 5 Gouvernemen-ten (Gouvernement Djokjakarta, Surakarta, Suma-tera, Borneo, Grote Oost).

Disamping itu terdapat zelfbesturende landschapp, locale resorten (daerah2 jang mempunjai pemerintahan sendiri jang didjalankan oleh penduduk asli), jaitu Vorstenlanden (kesul-tanan Djokja, kesunanan Surakarta di Djawa) dan daerah2 ke-sultanan, keradjaan2 ketjil di Sumatera, Kalimantan, Sula-wesi, Maluku, Bali dan Nusatenggara. Daerah Provincie djuga mengatur rumah tangga/pemerintah sendiri (merupakan daerah autonoom).

/Wilajah2 ...

Wilajah2 Provincie dan Gouvernement dibagi atas Residentie (keresidenan) dan didalam wilajah2 ini dibentuk pula daerah2 jang mengatur pemerintahan dan rumah tangga sendiri (daerah autonoom tingkat bawahan), jaitu Stadsgemeente (kotapradja), Regentschap (kabupaten) di Djawa dan didaerah luar Djawa baru mulai dibentuk Groepsgemeenschappen (kesatuan2 suku/adat).

Pembinaan urusan2 jang meliputi bidang Pekerdjaan Umum/ Openbare Werken jang kemudian djuga disebut "Waterstaatswerken", dilingkungan pusat pemerintahan dilakukan oleh Departement van Verkeer en Waterstaat (Dept. V en W) jang sebelumnja terdiri atas 2 Dept., jaitu Dept. van Gouvernementsbedrijven dan Dept. van Burgerlijke Openbare Werken. Sebagaimana dapat dilihat dari namanja, Dept. ini djuga membina urusan2 mengenai "Verkeer" (lalu-lintas, perhubungan, P.T.T., staatsspoorwegen/kereta api dll.).

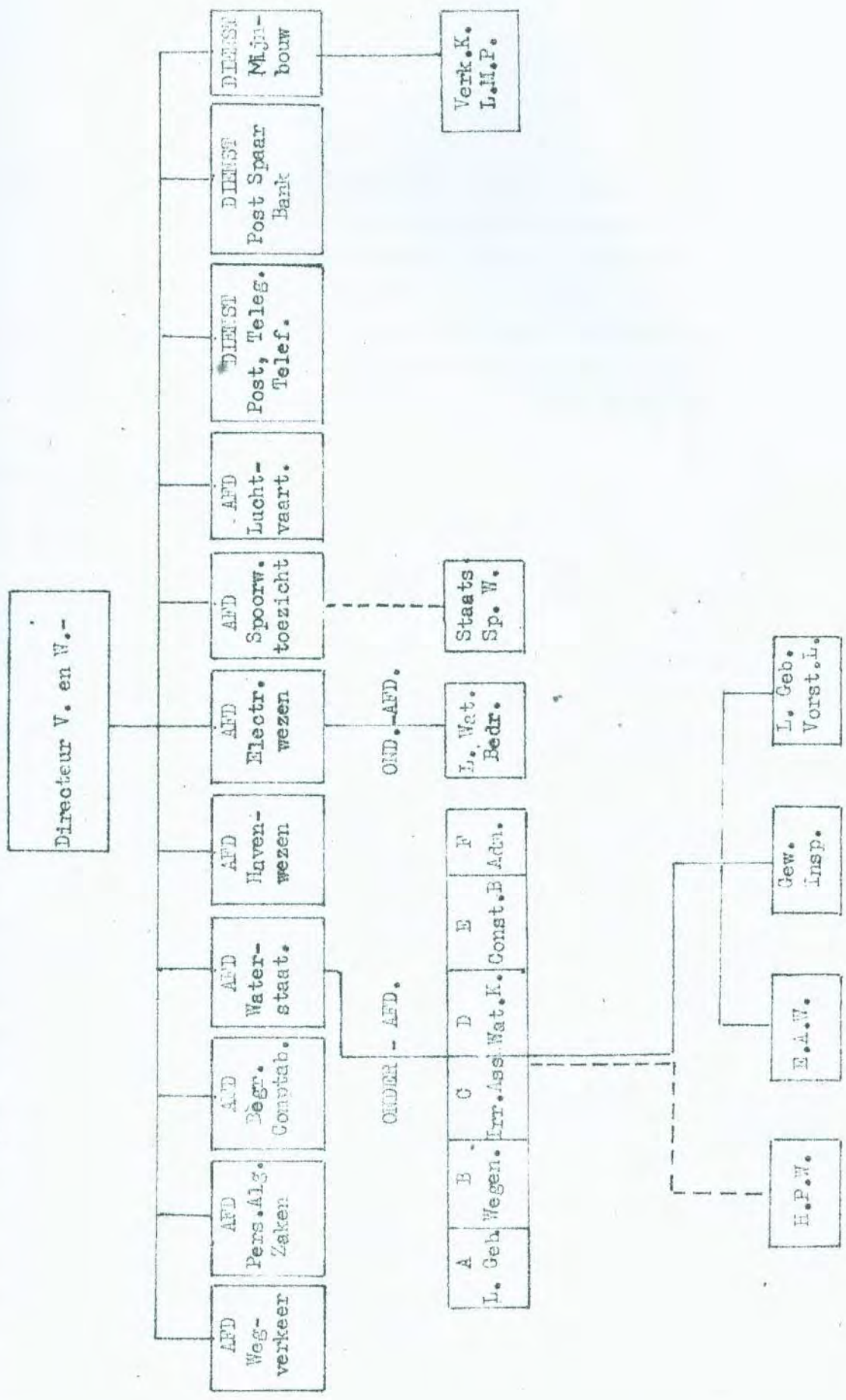
Dept. ini dikepalai oleh seorang Departements-hoofd (Kepala Departemen), disebut Directeur V en W, dibantu oleh seorang Onder Directeur dan membawahi bagian2, afdelingen dan diensten, sesuai dengan urusan2 jang masuk tugas/wewenang dari Dept. ini.

Diantara urusan2 jang meliputi bidang P.U., termasuk Afdeling Waterstaat dengan onder afdelingen :

- a. Landsgebouwen.
- b. Wegen.
- c. Irrigatie en Assainering.
- d. Waterkracht.
- e. Constructie bureau (untuk djembatan).

Disamping itu jang djuga meliputi bidang P.U. adalah Afd. Havenwezen (Pelabuhan), Afd. Electriciteitswezen (kelistrikan) dan Afd. Luchvaart (Penerbangan sipil). Mengenai kelistrikan dapat ditjatat, bahwa disamping oleh Pemerintah, usaha2 pembangkitan tenaga listrik dilakukan pula oleh pihak partikulier/swasta.

/Diantara ...



Diantara perusahaan2 swasta tsb. dapat disebut di Djawa :

- a. A.N.I.E.M. (Algemene Ned.Ind.Electr.Maatschappij).
- b. G.E.B.E.O. (Gemeenschappelijk Electr.Bedrijf Bandung en Omstreken).
- c. N.I.W.E.M. (Ned. Ind. Waterkr. Expl. Maatschappij).
- d. N.I.G.M. (Ned. Ind. Gas Maatschappij).
- e. Perusahaan2 setempat di Semarang, Solo Rembang Banjumas dll.

diluar Djawa :

- a. E.M.S. (Electr. Maatschappij Sumatera).
- b. S.T.E.M. (Samarinda Tenggara Electr. Mij.).
- c. E.M.B.P. (Electr. Mij. Balikpapan).
- d. E.Balom (Electr. Mij. Bali & Lombok).
- e. E.M.T.O. (Electr. Mij. Timor & Onderhorigheden).
- f. E. M. A. (Electr. Mij. Ambon).
- g. Perusahaan2 setempat, pabrik2 dan di-perusahaan2 pertambangan.

Organisasi Pekerdjaan Umum didaerah2 adalah sbb.:

Di Djawa diwilajah Prop.Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur urusan Waterstaat/Pekerdjaan Umum diserahkan kepada Pemerintah Propinsi jang untuk itu mempunyai „Provinciale Waterstaatsdienst" (Dines Pekerdjaan Umum Propinsi) jang dikepalai oleh seorang H.P.W. (Hoofd Prov.Waterstaatsdienst).

Diwilajah Gouv.Djokjakarta dan Gouv.Surakarta urusan tsb. didjalankan oleh Pemerintah kesultanan/kesunanan jang mempunyai „Sultanaatswerken", „Rijkswerken" dan „Mangkunegaranwerken". Disamping itu diwilajah Vorstenlanden ini terdapat 3 organisasi „Waterschap", jaitu Opak - Progo, Dengkeng dan Bengawan jang khusus mengatur soal2 perairan umum, pengendalian sungai2, pengairan dan „s'Landsgebouwendienst der Vorstenlanden" jang langsung berada dibawah Dept. V. en W.

/Di ...

Di-wilajah2 Regentschap (kabupaten) dan Stadsgemeenten (kotapradja) urusan Pekerdjaan Umum didjalankan oleh „Regentschapswerken" dan „Gemeentewerken".

Di Buitengewesten (daerah luar Djawa), pada Gouv. Sumatera, Borneo dan Grote Oost terdapat organisasi „Gewestelijke Inspectie van de Waterstaat" jang dikepalai oleh seorang Inspecteur.

Diwilajah Residentie terdapat „Residentie Waterstaatsdienst" dahulu dikenal dengan nama „Dienst der B.O.W.". Kepala dari dines ini biasanja disebut „E.A.W." (Eerst Aanwezend Waterstaatsambtenaar) jang berarti Pegawai P.U. jang pertama hadir atau jang pertama dipertanggung-djawabkan soal2 mengenai P.U..

Diwilajah Stadsgemeente dan Zelfbesturende landschappen, locale resorten, terdapat „Gemeentewerken", „Landschapswerken" dan „Locale Werken".

Hubungan hierarchie dari Directeur V en W ke-daerah2 adalah ke H.P.W. di Propinsi, ke Inspecteur di Gouv., E.A.W. di keresidenan dan kepada 'sLandsgebouwendienst di Vorstenlanden.

Structur organisasi di Propinsi adalah H.P.W. membawahi District dan District membawahi Sectie. Dikeresidenan E.A.W. membawahi Sectie.

Diantara ketentuan2 jang dikeluarkan dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dilingkungan pekerdjaan umum dapat ditjantumkan :

- a. A.W.R. 1936 ("Algemeen Water Reglement 1936") "Algemene Waterbeheersverordening", "Provinciaal Water Reglement" (baru ada di Prop.Djawa Barat), "Vorstenlandse Waterschaps-ordonantie", jang mengatur soal2 perairan umum, pengairan dll..

/b. B.W.R. ...

- b. B.W.R. 1934 ("Burgerlijke Woningregeling 1934") jang mengatur perumahan (huisvesting) untuk pegawai negeri sipil (burgerlijke landsdienaren) dan penetapan sewa.
- c. W.V.O./W.V.V. ("Weg Verkeers Ordonantie/Weg Verkeers Verordening"), jang mengatur persjaratan², pemakaian djalan² raya/umum pengangkutan dan pengamanan lalu lintas djalan.

Dalam hubungan ini Dines² P.U. di-daerah² mempunjai kedudukan sebagai "Wegbeheerder" (Penguasa Djalan) atau jang dipertanggung-djawabkan keadaan djalan serta peraturan persjaratan² pemakaiannja. Para petugas P.U. (para ingenieur, architect, cpzichter) ditundjuk selaku "Onbezoldigde Politie-ambtenaar" (pegawai Polisi ta' bergadji) jang mempunjai wewenang melakukan tindakan² kepolisian didalam ressort²-nja apabila terdjadi pelanggaran² tentang lalu-lintas, pemakaian djalan.

Anggaran Belandja atau dana kerdja Pekerdjaan routine dan pembangunan terdiri dari dana² dari Pemerintah pusat dan dari daerah jang diatur dalam "Ordonantie Financiële Verhouding" untuk Prop., kabupaten Groepsgemeenschap dan stadsgemeente.

Pelaksanaan pekerdjaan serta administrasi keuangan berpedoman pada I.C.W. (Indische Comptabiliteits Wet), diantaranya pengaturan pekerdjaan "in aanbesteding"/diborongkan dan "in eigen beheer"/dikerdjakan sendiri.

Persjaratan² technisch dll. berpedoman pada A.V.1941 ("Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare Werken in Ned. Indië").

- ✓ Dalam pekerdjaan pembangunan/pemeliharaan djalan² pada waktu itu dikenal suatu sistim pajak khusus "herendienst" atau rodi, dimana penduduk jang dewasa diharuskan menjumbangkan tenaganja untuk beberapa hari (6 h/kw) untuk keperluan tsb. diatas.

/Pajak ...

Padjak ini kemudian diganti dengan "Weg-geld", kewadjiban menjumbang wang untuk keperluan djalan2 dan achirnja dihapuskan.

↳ Dinas Pêkerdjaan Umum jang pada waktu itu djuga disebut "Welvaarts-dienst" atau dines kemakmuran, karena usaha2nja dibidang irigasi, djalan2 dll., dan merupakan suatu dines teknik dari Pemerintah, dipimpin oleh tenaga2 teknik. Sumber dari tenaga2 teknik ini pada waktu itu adalah institut2 Pendidikan Teknik Pemerintah di Negeri Belanda dan Indonesia jang sangat terbatas djumlahnja.

Di Indonesia untuk tenaga teknik Tinggi terdapat T.H.S. (Technische Hoge School/Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung (semula hanja untuk djurusan civiel ingenieur/insinjur sipil, kemudian setelah Negeri Belanda diduduki Djerman, djuga untuk djurusan kimia dan mesin), untuk tenaga2 teknik menengah terdapat hanja 3 sekolah teknik menengah K.W.S. (Koningin Wilhelmina School) di Djakarta, K.E.S. (Koningin Emma School) di Surabaya dan P.J.S. (Prinses Juliana School) di Djokja. Untuk tenaga2 teknik rendah dibeberapa kota besar terdapat sekolah2 Pertukangan (Europese dan Hollandse Ambachtschool).

Pada umumnja H.P.W. dan E.A.W. didjabat oleh tenaga2 insinjur sipil Belanda jang berpengalaman jang melalui masa kerdjanja di sectie2 dan district2. District2 dan sectie2 didjabat oleh tenaga insinjur sipil (di Djawa) dan tenaga2 teknik menengah (diluar Djawa),.

Regentschaps-werken, Landschaps-werken dan Locale werken didjabat oleh tenaga2 teknik menengah. Gemeentewerken dibeberapa kota2 besar dipimpin oleh tenaga2 insinjur.

/II. Keadaan ...

— 002 —

II. Keadaan pada djaman pendudukan Djepang.

Setelah berkobarnja perang Pacific antara sekutu (Amerika, Inggris, Belanda dll.) melawan Djepang maka pada bulan Maret 1942 Pemerintah Ned. Indië menjerah dan mulai dari saat itu wilajah Indonesia berada dibawah Pemerintah Djepang.

✓ Struktur Pem. Pendudukan Djepang jang merupakan Pemerintah Militer, membagi wilajah Indonesia atas 3 Wilajah Pemerintahan, jaitu :

- a. Pemerintah Militer Angkatan Darat (Riku-Gun) di Djakarta untuk Djawa dan Madura.
- b. Pemerintah Militer Angkatan Darat di Bukittinggi untuk Sumatera.
- c. Pemerintah Militer Angkatan Laut (Kai-Gun) di Makassar untuk wilajah Indonesia bagian Timur (Kalimantan, Sulawesi dll.). ✓

Tiap wilajah dikepalai oleh seorang Gunseikan, kemudian disebut Saiko Sikikan dan berdiri sendiri-sendiri. Pembagian administratif dari tiap wilajah mengoper pembagian dalam wilajah2 Keresidenan (Syuu), Kabupaten (Ken) dan Kota-pradja (Si) seperti djaman Ned. Indië. Hanja wilajah2 Propinsi dan Gouvernemen ditiadakan. Daerah2 kesultanan, zelfbesturende landschappen dahulu berdjalan terus dan disebut Kooti.

✓ Dibidang Pekerdjaan Umum ditiap wilajah Pemerintahan berlaku pengoperan2 organisasi djaman Ned. Indië, hanja ada terdjadi beberapa pemisahan jang disesuaikan dengan ketentuan2 dari pihak Djepang. Bekas Dept. V en W Bandung dinamakan "Kotubu Bunsitsu".

Pada saat itu mulai dilazimkan pemakaian istilah "Pekerdjaan Oemoem" (P.O.), "Oeroesan Pekerdjaan Oemoem" (O.P.O.), "Pekerdjaan Umum" (P.U.) disamping istilah Djepang "Doboku".

/Organisasi ...

Organisasi Pekerdjaan Umum di-daerah2 di-keresidenan2 pada umumnja berdiri sendiri2. "Kotubu Bunsitsu" Bandung hanja mempunjai hubungan dengan wilajah di Djawa, hubungan dengan luar Djawa tidak ada.

Tenaga2 pimpinan Belanda seluruhnja digantikan oleh tenaga2 Djepang dan Indonesia.

Pengoperan tenaga2 pimpinan Belanda jang selama ini sebagian besar melantjarkan segala kegiatan2 P.U. baik technisch maupun administratif, kepada tenaga2 Djepang dan Indonesia, penjesuaian2 kepada tata-kerdja Djepang, banjak membawa pengaruh pada keutuhan organisasi P.U.. Djumlah tenaga2 Indonesia jang berpengalaman terutama didikan teknik tinggi (insinjur) sangat terbatas.

Pada waktu itu diusahakan tambahan tenaga2 teknik dengan membuka kembali institut2 pendidikan Tinggi dan menengah disesuaikan dengan sistim di Djepang. Pun diusahakan pengiriman2 tenaga2 untuk dididik di Djepang. Selama masa pendudukan Djepang usaha2 ini belum memberikan hasil jang berarti.

Anggaran belandja untuk seluruh kegiatan2 P. baik routine maupun pembangunan terutama didaerah luar Djawa tergantung pada Pemerintah/penguasa (Militer) setempat. Sebagian besar pembiajaan ditudjukan pada kebutuhan perang.

Sistim pelaksanaan pekerdjaan ada jang masih mempergunakan sistim dan norma2 djaman "Ned.Indië", ada jang menurut Sistim Djepang.

Tidak dipegang teguh lagi pembangunan2/gedung Pemerintah oleh organisasi P.U., sebab instansi2 lain turut mengerdjakannja. Mutu Pekerdjaan2 tidak diperhatikan lagi dan mulai mundur, sesuatunja ditudjukan pada kebutuhan perang.

/Diantara ...

Diantara tjara2 jang dilakukan untuk meringankan biaja pekerdjaan dapat ditjatat tjara "kingrohosi", suatu sistim kerdja "gotong-rojong/suka-rela" jang diwadjibkan kepada seluruh lapisan masjarakat besar ketjil, tua muda sampai ke-anak2 sekolah, mengerahkan tenaga dan bahan2 untuk waktu2 jang dikehendaki oleh penguasa2 setempat, semuanja dengan dalih untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dan kemakmuran bersama.

III. Keadaan pada djaman Indonesia merdeka.

Djaman Indonesia merdeka jang dimulai pada saat Proklamasi tgl. 17-8-1945 menggambarkan perobahan dasar Pemerintahan, dari Pemerintah kolonial ke Pemerintah Republik jang merdeka.

Guna ichtisar djaman merdeka ini dapat dibagi dalam 3 phase sbb.:

1. Phase 1945 - 1949.
2. " 1949 - 1950.
3. " sesudah 1950.

Structur pemerintahan serta hubungannja dengan organisasi Pekerdjaan Umum pada tiap phase dapat diuraikan sbb.:

1. Phase 1945 - 1949.

Phase ini menggambarkan berachirnja perang Pacific/pe-rang dunia II, kebangkitan suatu bangsa dari bangsa jang didjadjah ke bangsa jang merdeka. Phase ini menggambarkan pula masa peralihan, dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan tgl. 17-8-1945, pembentukan Pemerintah R.I. jang dikepalai oleh seorang Presiden berkedudukan di Djokjakarta, kedatangan tentara Sekutu/Inggris di Indonesia, pengakuan de facto oleh pihak Sekutu kepada Pem. R.I. dan permulaan perdjjuangan mempertahankan Pem. R.I..

/Pem. R.I. ...

Pem. R.I. berbentuk negara Kesatuan atas dasar U.U.D. - 1945. Wilayah R.I. terdiri atas 8 propinsi, Djawa Barat, Tengah, Timur, Sumatera, Borneo/Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusatenggara.

Kegiatan Pem. R.I. pada waktu itu ditjurahkan pada pengoperan pimpinan dari bangsa Djepang kebangsa Indonesia dan membantu pihak Sekutu menjelesaikan masalah tawanan perang dan repatriasi tentara Djepang.

Pihak Sekutu/Inggris untuk tugas ini mulai menguasai kota2 besar di Indonesia dibantu oleh pihak Belanda dengan nama N.I.C.A. (Netherlands Indies Civil Administration). Dengan membontjeng pada Sekutu/Inggris pihak Belanda jang masih memegang kekuasaan de jure atas wilayah Indonesia, mulai berusaha menegakkan kembali seluruh kekuasaannya atas Indonesia. Di Djawa dan Sumatera nama N.I.C.A. diganti dengan A.M.A.C.A.B. (Allied Military Administration Civil Affairs Branch).

Pada waktu itulah mulai bentrokan2 bersendjata antara kesatuan2 bersendjata R.I. dengan pihak Belanda/N.I.C.A. dan Inggris. Berangsur-angsur pihak Sekutu/Inggris meninggalkan Indonesia dan menjerahkan kekuasaan di-wilayah2 jang mereka kuasai kepada pihak Belanda dimulai dengan wilayah Indonesia bagian Timur dan achirnja di Djawa dan Sumatera. A.M.A.C.A.B. diganti dengan Tijdelijke Bestuursdienst. Pusat Pem. Belanda jang berkedudukan di Djakarta dipimpin pada waktu itu oleh Luitenant Gouverneur General. Untuk memperkokoh kedudukannya pihak Belanda melantjarkan agresi2 militer jang mereka namakan "Politionele Actie" jang itu jang pertama pada bln. Juli 1947 dan jang ke II pada bln. Des. 1948. Kedua agresi militer ini jang buat bangsa Indonesia merupakan "Perang kemerdekaan" ke I dan ke II pada hakekatnja telah memperketjil wilayah jang dikuasai oleh Pem. R.I..

/Sesudah ...

Sesudah aksi Polisionil ke II atau clash-II, seluruh wilayah Indonesia, ketjuali Atjeh dan daerah2 pedalaman, dikuasai oleh Belanda.

Di-wilajah2 jang baru mereka kuasai pihak Belanda menunjuk seorang Regeringscommisaris voor Bestuurs-aangelegenheden, disingkat "Recomba" langsung dibawah Luit. G.G. jang kemudian bernama "Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon".

Pem. R.I. Djokjakarta dilandjutkan oleh P.D.R.I. (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) jang berkedudukan di Koto Tinggi didaerah pedalaman Sumatera Barat dan terdiri dari seorang Ketua jang memimpin suatu kabinet darurat.

✓ Di Sumatera sebelum P.D.R.I. dibentuk, telah terdapat suatu badan perwakilan Pem.Pusat, jaitu Komisariat Pemerintahan Pusat (Kompempus) jang diadakan ketika Prop.Sumatera dihapuskan dan didjadikan 3 Prop., Sum. Utara, Sum. Tengah dan Sum. Selatan.

Untuk mempertahankan kedudukannja seperti sediakala pihakBelanda mentjetuskan gagasan membentuk suatu negara Indonesia Serikat jang akan berada didalam commonwealth/ge-meenebest Belanda. Pembentukan negara serikat tsb. didahului dengan pembentukan "Voorlopige Federale Regering van Indonesie" atau "Pemerintah Federal Sementara"/"Pemerintah Pre-Federal" jang diketuai oleh Luit.G.G./Hoge Vertegenwoordiger v/d Kroon.

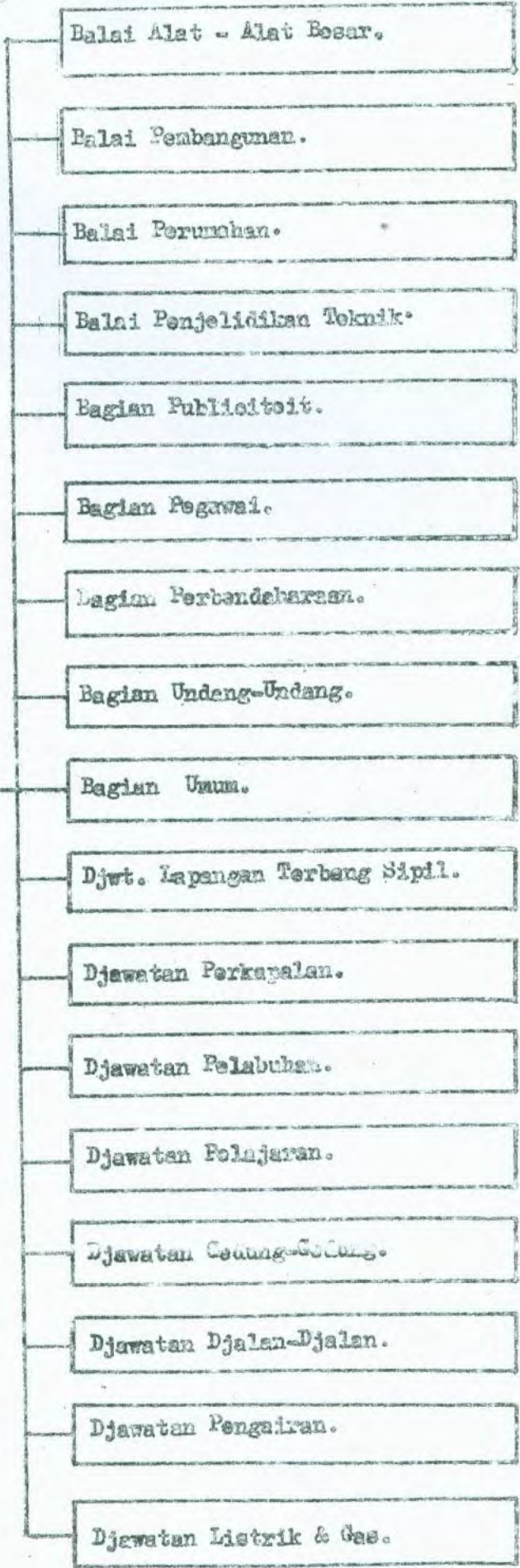
Mulailah ditjiptakan Negara2 bagian, diantaranja baru terwujud N.I.T. (Negara Indonesia Timur), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan dan Negara Djawa Timur.

✓ Pembinaan Pekerdjaan Umum dipusat Pemerintahan R.I. pada awal djaman merdeka itu dilakukan oleh suatu Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan jang dipimpin oleh seorang Menteri didampingi oleh seorang Menteri Muda.

/Penjusunan ...

Schema Susunan
Kementerian Pekerjaan Umum 1947.

Menteri
Sekretaris Djenderal



Penjusunan organisasi baru, penjesuaian organisasi P.U. dari alam pendjadjahan ke-alam merdeka mengikuti pula keadaan dari perkembangan Org. Pemerintah dalam masa peralihan/perdjuangan tersebut.

Dalam kabinet pertama R.I. ini, struktur Kem. P.U./Phb. belum sampai tersusun dan telah disusul oleh kabinet kedua (Kab.Parlementair) dimana Kem. P.U. dan Perh. dipetjah menjadi Kem. Pekerdjaan Umum dan Kem. Perhubungan.

Baru pada saat itu dimulai menjusun struktur org. Kem.P.U. jang semula berkedudukan di Bandung dan kemudian, setelah Bandung dikuasai oleh Inggris/N.I.C.A. dipindahkan ke Purworedjo dan Djokjakarta.

Struktur org. pada waktu itu terdiri dari Menteri/Menteri Muda membawahi sedjumlah djawatan2, balai2/bagian2 jang umumnja mengoper keadaan diwaktu djaman Ned. Indië.

Sebagai pembantu Menteri diadakan djabatan Sekretaris Jenderal. Setelah dilakukan pemisahan dari unsur2 jang masuk P.U. dan Perhubungan maka djawatan2/bagian2/balai2 dari Kem. P.U. terdiri dari :

- a. Djawatan Listrik dan Gas.
- b. " Djalan2 dan lalu-lintas.
- c. " Gedung2.
- d. " Pelajaran.)
- e. " Perkapalan.) Semula merupakan
- f. " Pelabuhan.) Djawatan urusan Laut.
- g. " Lapangan terbang sipil.
- h. Balai Penjelidikan konstruksi.
- i. " Perumahan.
- j. " Pembangunan.
- k. " Alat2 Besar.
- l. Bagian U m u m.
- m. " Undang2.
- n. " Perbendaharaan.
- o. " P e g a w a i.
- p. " Publiciteit.

/Organisasi ...

Organisasi P.U. di-daerah2 mengoper organisasi dari djaman pendudukan Djepang jang sebagian besar mengikuti org. djaman kolonial Belanda. Organisasi dines2 P.U. Propinsi, hanja ada di Djawa. Organisasi P.U. Propinsi di Sumatera baru dibentuk dalam thn. 1947. Semula dipakai nama Djawatan P.U. Propinsi kemudian ditetapkan Dinas P.U. Propinsi. Pernah pula Djaw./Dinas P.U. Propinsi diberi nama Djaw./Dines P.D.G. (Pengairan Djalan2 dan Gedung2) dan Djaw./Dines P.U. dan Perhubungan.

Pada umumnja berhubung dengan keadaan perdjjuangan organisasi P.U. belum berfungsi dan hubungan hierarchisch dari Kem. P.U. Djokja dengan daerah2 belum dan tidak terwujud. Segala kegiatan P.U. dikerahkan untuk membantu perdjjuangan tersebut.

Pada waktu itu dilingkungan P.U. mulai dibentuk serikat sekerdja/serikat Buruh (S.B.D.P.U./Serikat Buruh Djawatan Pekerdjaan Umum, S.B.L.G./Serikat Buruh Listrik dan Gas, S.B.L.P./Serikat Buruh Laut dan Pelajaran).

Pihak Belanda di Djakarta dan di-wilajah2 jang berangsur-angsur dikuasainja mulai pula mengatur dan menjusun organisasi2 dibidang P.U..

Di Pusat Djakarta dibentuk organisasi baru, "Dept. van Waterstaat en Wederopbouw" (W en W) dan "Dept. van Verkeer Energie en Mijnwezen" (V.E.M.) jang masing2 dipimpin oleh seorang "Sekretaris van Staat".

Di-daerah2 dibentuk tjabang2 "W en W" dan di-negara2 bagian suatu kementerian ketjil jang baru terwujud di N.I.T., jaitu Menteri v. V. en W./Kementerian Lalu Lintas dan Pengairan.

Disamping org. W.en W. ini, untuk kepentingan pembangunan kembali (wederopbouw) pihak Belanda membentuk jajasan2 diantaranya di Djakarta, C.S.W. ("Centrale Stichting Wederopbouw")

/dengan ...

dengan tjabang2-nja R.O.B. (Regionale Opbouw Bureau) jang membangun kota sateliet Kebajoran.

Di N.I.T. terdapat W.O.I. ("Wederopbouw Oost Indonesie") jang mempunjai tjabang2 P.O.D. ("Plaatselijke Opbouw Dienst") di-kota2 tertentu.

Organisasi2 P.U. tjiptaan Belanda ini dipimpin oleh tenaga2 Belanda ini dipimpin oleh tenaga2 Belanda dan tenaga2 Indonesia jang tidak sanggup bertahan dan berdjung mempertahankan Pem. R.I..

Kegiatan2 dari org. P.U. tjiptaan Belanda ini, berhubung dengan keadaan politik/clash bersendjata dengan R.I. terbatas pada daerah2 jang dikuasai penuh oleh Belanda.

✓ 2. Phase 1949 - 1950.

Phase ini menggambarkan berachirnja pertentangan politik, clash bersendjata antara R.I. dan Belanda dan berachirnja kekuasaan de jure Belanda atas wilajah Indonesia dengan terdjadinja peristiwa penjerahan kedaulatan pada bln. Des.1949.

Setelah agresi militer II berachir dengan diadakan persetujuan Rum - Royen, maka pihak R.I. terpaksa ikut serta dalam pembentukan suatu Negara Indonesia Serikat.

P.D.R.I. di Sumatera ditiadakan lagi dan mendjelma kembali mendjadi R.I. Djokjakarta. Pada waktu itu diadakan Konferensi Medja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda antara keradjaan Belanda dan Pem. R.I. serta delegasi dari Negara2 bagian tjiptaan Belanda jang tergabung dalam B.F.O. ("Bijeenkomst voor Federaal Overleg") dan sebagai hasil perundingan2 lahirlah Republik Indonesia Serikat dan terdjadi lah penjerahan kedaulatan pada tgl. 27-12-1949. ✓

/Sebagian ...

Sebagian dari wilayah Indonesia, ex "Ned.Indië", jaitu wilayah Nieuw Guinea (Irian Barat) tidak termasuk dalam penjerahan kedaulatan tersebut. Daerah ini didjadikan daerah sengketa antara Belanda dan R.I.S. jang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun.

Negara Rep.Indonesia Serikat, jang berbentuk serikat/federasi dan beranggotakan negara2 bagian, Pem.R.I. - Djokja/Proklamasi dan negara2 B.F.O. ternyata tidak bisa bertahan lama. Berangsur-angsur Negara2 bagian tjiptaan Belanda bergabung pada Pem. R.I.-Djokjakarta dan achirnja pada tgl. 17-8-1950 terbentuk kembali Negara Kesatuan Rep. Indonesia.

Organisasi Pekerdjaan Umum pada saat lahirnja R.I.S. menggambarkan keadaan doublures dimana pada pusat Pemerintah R.I.S. Djakarta terdapat Kem. Perhubungan Tenaga dan Pekerdjaan Umum R.I.S. sebagai pendjelmaan dan peleburan dari Dept. v. W.en W., Dept. v. V.E.M. (ketjualian Mijnbouw jang masuk Kementerian Kemakmuran) dan Dept. v. Scheepvaart dari djamar Pre-Federal.

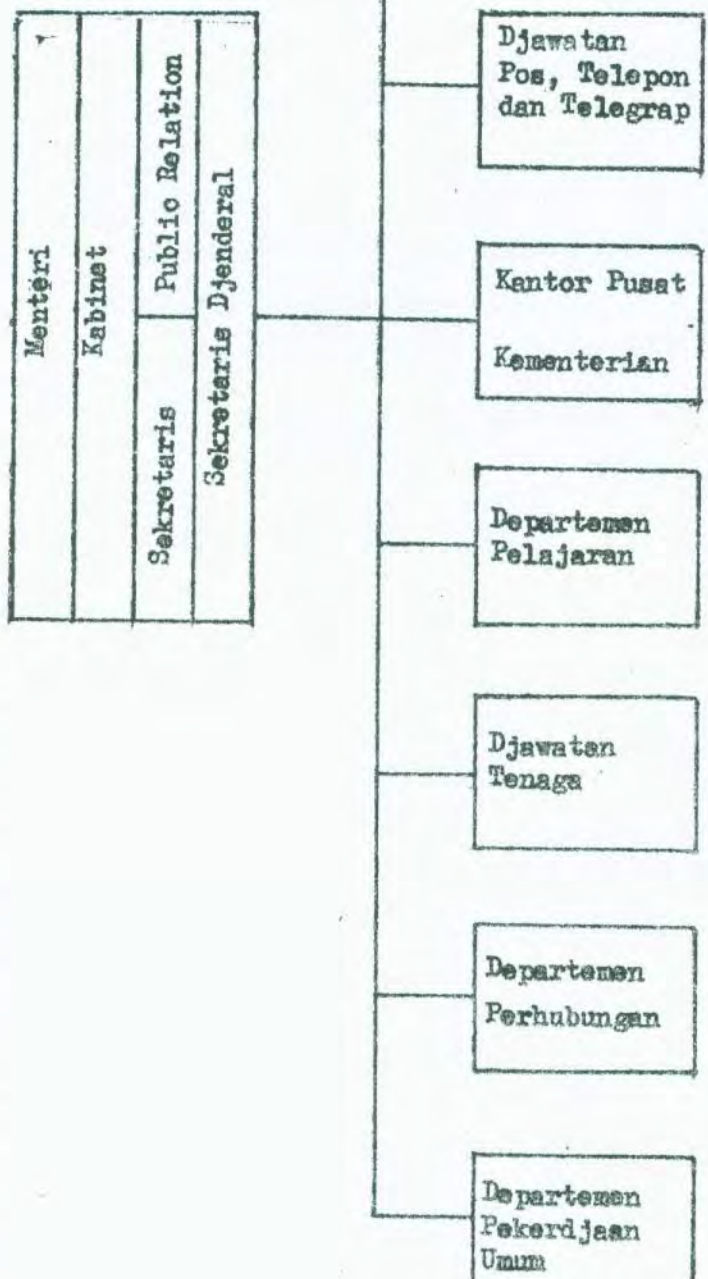
✓ Pada org. Kem.Perhubungan Tenaga dan Pekerdjaan Umum R.I.S. ini terdapat Departemen2/djawatan2, diantaranya :

- a. Dep. Pekerdjaan Umum, jang mengurus Djalan2 Pengairan dan Gedung2.
- b. " Perhubungan, jang membawahi :
D.A.D.S. (Djawatan Angkutan Darat dan Sungai).
Bahagian Penerbangan Sipil.
Djawatan Pelabuhan.
Bahagian Perniagaan (urusan untuk pemesanan keperluan Kementerian)._L
- c. Djawatan P.T.T.

/d. Djawatan ...

20

Schema Susunan
Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjiaan Umum R.I.S. 1949



- d. Djawatan Tenaga, jang mengurus :
 - Kelistrikan.
 - Tenaga air (waterkracht).
 - Penupetel (Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga listrik).
- e. Djawatan Kereta Api.
- f. Djawatan Meteorologie dan Geophysik.
- g. Djawatan Pelajaran jang mengurus penerangan pantai perambuan² untuk pelajaran interinsulair dan internasional.

Org. Kem. Perh.Tenaga dan P.U. R.I.S. ini dipimpin oleh tenaga² Indonesia. Tenaga² Belanda dikembalikan ke Negeri Belanda dan diantarannya ada jang didjadikan penasehat sementara.

Pada Pusat Pem. R.I. -Djokjakarta terdapat Kem. Pek.Umum dan Perhubungan R.I. sebagai landjutan dari Kem. P.U. sebelum penjerahan kedaulatan.

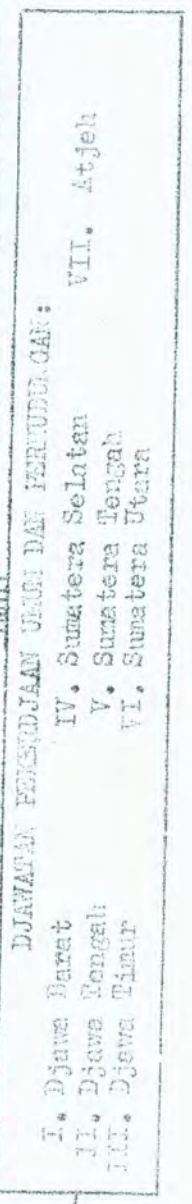
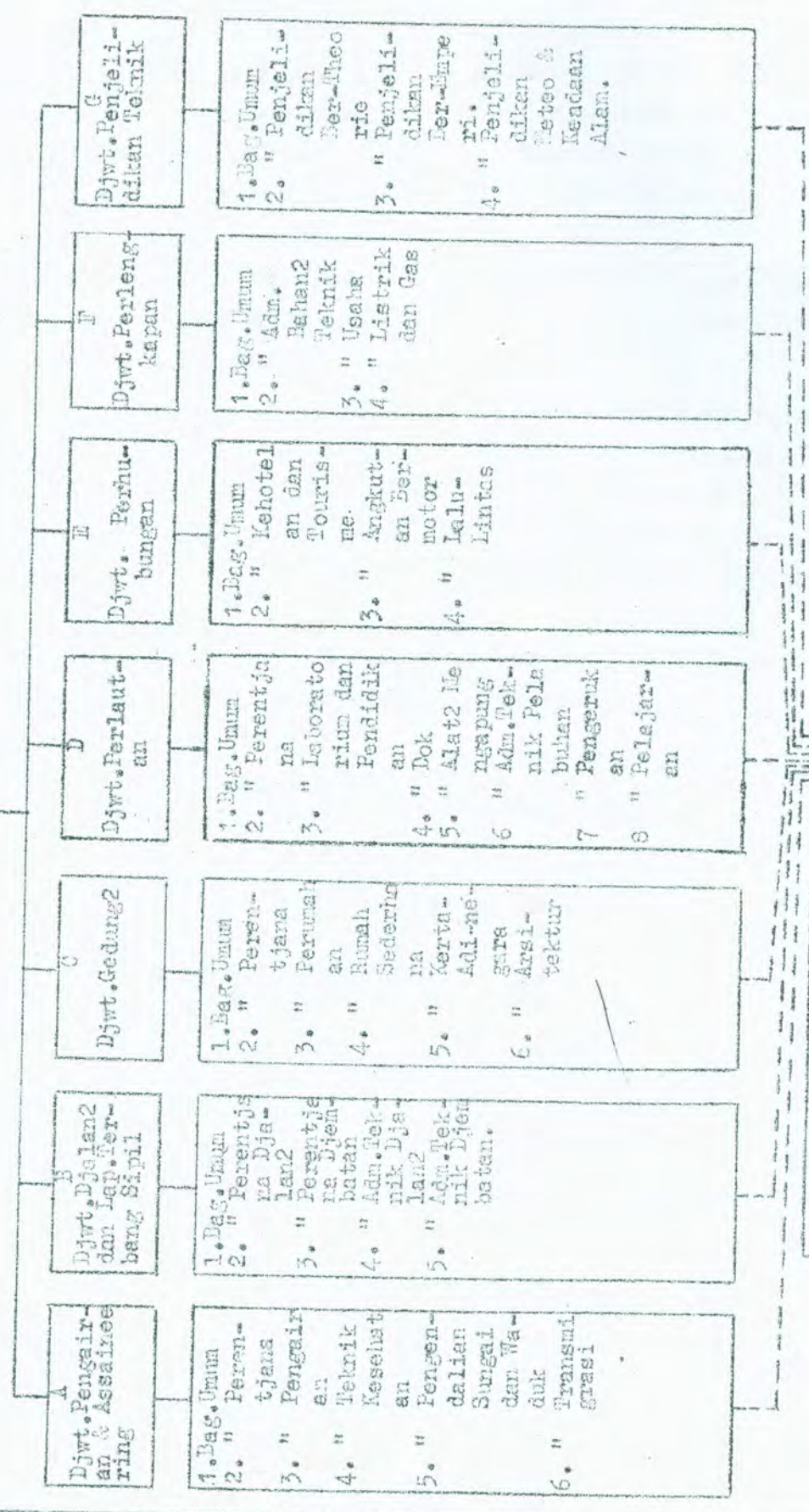
Pada org. Kem. P.U./Perh. - R.I. ini terdapat djawatan², diantarannya :

- a. Djawatan Pengairan dan Assainering.
- b. " Djalan² dan Penerbangan Sipil.
- c. " Gedung².
- d. " Perlautan.
- e. " Perhubungan.
- f. " Perlengkapan.
- g. " Penyelidikan Teknik.

Menteri dibantu oleh Sekr.Djenderal. Urusan² teknik dibina oleh Djawatan² dan urusan administrasi oleh Bagian² (Sekretariat, Perundang-undangan, Perbendaharaan, Pegawai dan Publiciteit). Selanjutnya ada bagian Inspeksi untuk pengawasan.

/Keadaan ...

R/6



Keterangan:
- - - = Hubungan teknik
..... = Hubungan administrasi

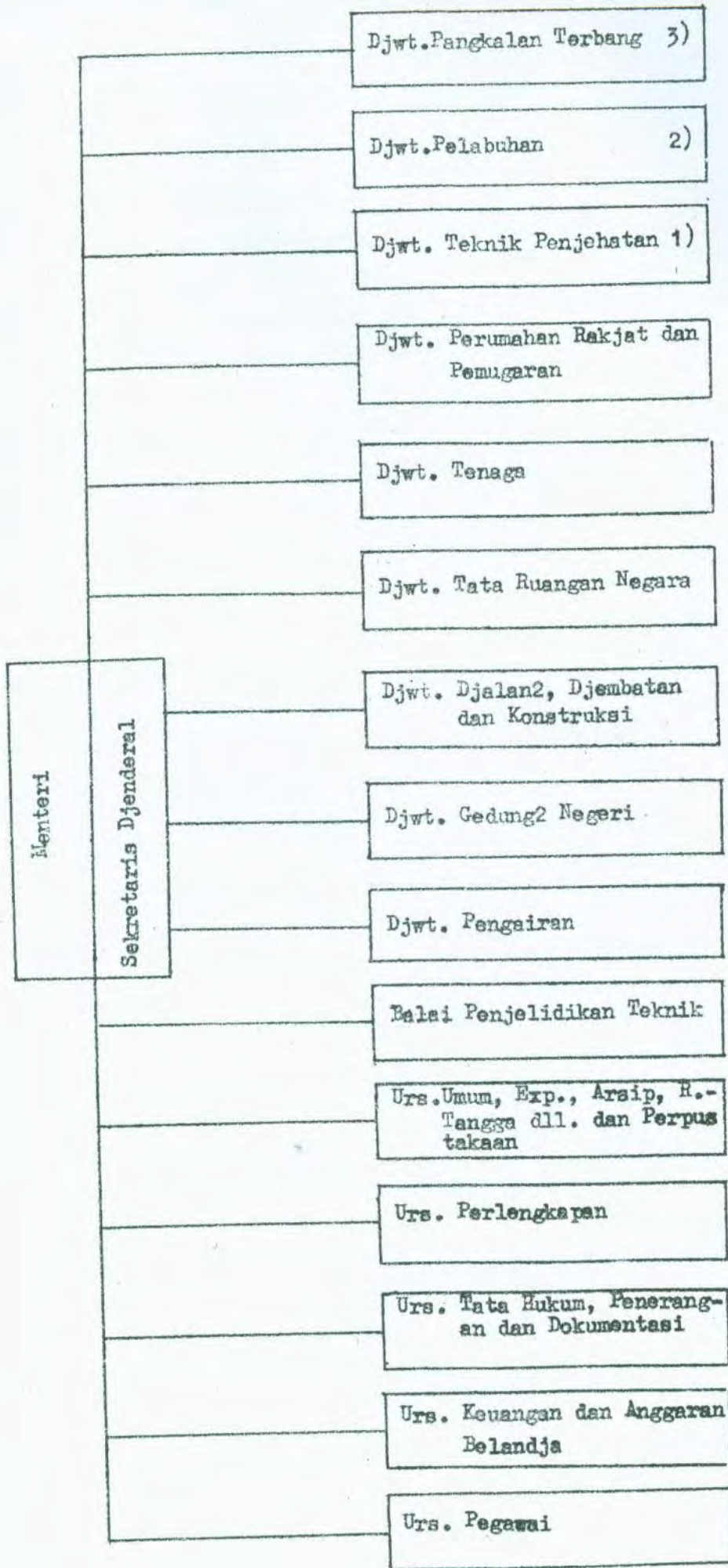
Keadaan doublure antara pusat R.I.S. dan pusat R.I. Djokja, ditambah dengan doublure wilayah kekuasaan di-daerah2 berdjalan terus sampai saat structur pemerintahan berubah dari Negara serikat R.I.S. ke Negara kesatuan R.I.. Kem. Perh.Tenaga dan P.U. - R.I.S. dilebur mendjadi Kem. P.U. dan Tenaga berkedudukan di Djakarta. Pada saat itulah baru dapat dimulai konsolidasi serta koordinasi dari seluruh organisasi P.U. baik dipusat Djakarta maupun di-daerah2.

Menteri P.U.T., pimpinan kementerian membawahi Djawatan2 jang djumlahnja disesuaikan dengan keadaan Kem. R.I. Djokja dan Kem. R.I.S. Djakarta. Dengan adanja Kem. Perhubungan maka beberapa urusan diserahkan ke Kem. ini, diantaranya urusan pelabuhan, lalu-lintas, kereta api dan P.T.T..

Atas penggabungan serta pemisahan itu Kem. P.U.T. terdiri dari Djawatan2, Balai dan Urusan, jaitu :

- a. Djawatan Pengairan.
- b. " Gedung2 Negeri.
- c. " Djalan2/Djembatan dan Konstruksi.
- d. " Tata ruangan Negara.
- e. " T e n a g a .
- f. " Teknik Penjehatan.
- g. Balai Penjelidikan Teknik.
- h. Urusan P e g a w a i.
- i. " Keuangan dan Anggaran Belandja.
- j. " Tata Hukum, Penerangan Dokumentasi.
- k. " Perlengkapan.
- l. " Umum, Expedisi Arsip Rumah Tangga Perpustakaan.

/Menteri ...



1) masih termasuk Kem. Kesehatan.
 2) idem Kem. Perhubungan.
 3)

Menteri P.U.T. dibantu oleh seorang Sekr. Djenderal jang mengkoordinier semua djawatan2 dan urusan2. Mengenai Ketenagaan dapat ditjatat, bahwa pada waktu itu usaha2 swasta terdahulu dibidang listrik dan Gas didjalankan oleh Pemerintah/Negara, untuk mana dibentuk Perusahaan2 Negara (P.L.N./G.).

Di-daerah2 jang terdiri atas 10 Propinsi dan 1 Daerah Istimewa dibentuk Dines2 P.U. Propinsi dan P.U. Daerah Istimewa. Hubungan hierarchis antara Kem. di Pusat dan Dines2 P.U. didaerah mulai dilaksanakan.

Tenaga2 tehnik (tinggi dan menengah) jang memegang pimpinan baik dipusat maupun didaerah, terdiri dari tenaga2 Indonesia dan djumlahnja masih sangat terbatas. Tambahan tenaga, lepasan2 dari institut2 pendidikan2 baik jang dimulai oleh R.I. Djokja dan oleh Pem. pendudukan Belanda boleh dikatakan belum mentjukupi.

3. Phase sesudah tahun 1950.

Dilingkungan organisasi Pemerintahan dalam phase ini dimulai dengan pengkonsolidasian susunan negara kesatuan, sebagai suatu negara jang baru saja mempunjai kedaulatan penuh. Pengkonsolidasian ini hingga sekarang masih tetap berdjalan untuk menudju pada suatu keadaan jang stabil baik politis maupun ekonomis.

Dalam melalui phase ini banjak terdjadi hal2 serta peristiwa2 jang pernah mengakibatkan negara dalam keadaan darurat. ✓

Diantara peristiwa2 itu dapat ditjatat :

a. Pemberontakan bersendjata dari peninggalan Pemerintah Pre Federal/Belanda, Andi Azis, A.P.R.A. (Angkatan Perang Ratu Adil), R.M.S. (Republik Maluku Selatan). L

/b. Pemberontakan ...

- b. Pemberontakan bermotif agama, D.I./T.I.I. (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), Daud Beureuh, Ibnu Hadjar, Kahar Muzakar.
- c. Gerakan untuk menuntut pembangunan daerah yang kemudian menjadi pemberontakan P.R.R.I./Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakjat Semesta).
- d. Gerakan memperjuangkan wilayah Irian Barat, Trikora (Tri Komando Rakjat).
- e. Gerakan menantang Inggris dan Malaysia, Dwikora (Dwi Komando Rakjat).
- f. Gerakan 30 September (G.30.S.) pemberontakan P.K.I. (Parti Komunis Indonesia).

Dalam masa itu terjadi penggantian UUD 1945 ke UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit Presiden tahun 1959.

Susunan Pemerintahan/Kabinet silih berganti, bahkan pernah pula anggota kabinet berjumlah sekitar 100 orang dan dikenal dengan "Kabinet 100 Menteri".

Pemerintah di-daerah2 Propinsi mengalami pula pengaruh dari perubahan2 dari Pemerintah Pusat.

Pimpinan tunggal dari Pemerintah Propinsi oleh Gub. mulai dipengaruhi oleh badan2 Tjatur Tunggal, Pantja Tunggal, Muspida, dalam mana pimpinan Angk.Bersendjata/Kedjaksanaan dll. di-daerah2 propinsi ikut menentukan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah, setelah golongan2 termaksud menjadi Angkatan/Dep. dilingkungan Pemerintah Pusat. Djabatan Gubernur, pimpinan2 pemerintah otonoom bawahan mulai diduduki oleh anggota2 angkatan bersendjata.

/Djumlah ...

Djumlah propinsi bertambah dengan terbentuknja prop2./ daerah2 istimewa baru diantaranya :

- a. Daerah Istimewa Atjeh, prop. Sum.Barat, Djambi, Riau, Lampung, Bengkulu, D.C.I. (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Raya.
- b. Prop. Kal. Barat, Tengah, Timur.
- c. Prop. Bali, Nusatenggara Barat, Timur, Maluku.
- d. Prop. Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Tenggara.
- e. Prop. Irian Barat.

Sampai tahun 1969 wilajah R.I. terdiri dari 26 propinsi. Pemerintah daerah di Irian Barat setelah berakhirnja gerakan Trikora, berada dibawah pengawasan U.N.T.E.A. (United Nations Temporary Executive Administration) kemudian dio-per oleh Dep. Dalam Negeri dan setelah diadakan „pepera“ (penentuan pendapat rakyat) resmi mendjadi propinsi R.I..

* Phase ini menggambarkan pengkonsolidasian Organisasi Pekerdjaan Umum dari djaman kolonial, djaman perdjjuangan ke djaman merdeka berdaulat penuh.

Dasar hukum dari Dines2 P.U. Propinsi atau jang mengatur penjerahan sebagian dari kekuasaan Pusat, c.q. Kem. P.U.T. kepada Pemerintah otonoom Propinsi mulai disempurnakan.

√ Selama ini ketentuan2 tugas dari Dinas Pekerdjaan Umum di Propinsi diwilajah Republik Indonesia hanja berpedoman pada undang2 pembentukan daerah2 serta pemerintah otonoom propinsi dan daerah2 istimewa setingkat dengan Propinsi, jaitu : UU 1948/22, UU 1948/10 (untuk Sumatera) sebelum aksi Militer Belanda dan UU 1950/2 dan UUSIT 1950/44 (untuk Indonesia Timur) setelah penjerahan kedaulatan.

Tugas/kekuasaan jang diserahkan itu meliputi pembinaan objek2 (djalan2, pengairan, gedung2) jang penting untuk lingkungan Propinsi,

/disertai ...

disertai penjerahan hak2 penggunaan dan hak2 pemilikan atas barang2 bergerak dan tetap jang dibutuhkan untuk tugas pembinaan tersebut. Disamping itu kepada Propinsi diperbantukan para pegawai jang berada di Propinsi dan tenaga2 dari Pusat untuk mendjalankan tugas jang diserahkan.

Dengan adanja penjerahan ini, lahirlah hak mengawas dari jang menjerahkan jaitu Menteri, jang mempergunakannja dengan bidjaksana sehingga tidak mentjampuri dan menjinggung hak otonoom dari Propinsi.

Tugas2 jang mengandung aspek2 nasional, internasional diketjualikan dari penjerahan tsb. (disebut "voorbehouden taak") diantaranya pekerdjaan pembangkitan tenaga air, pengerukan muara sungai, tata penggunaan ruangan/tanah Negara, pembangunan kota2 dll..

Dalam hubungan ini, mengenai djalan2 dapat ditjatat bahwa di Sumatera dan di-pulau2 lainnja akan diketjualikan dalam penjerahan tsb. suatu "asweg" (djalan poros) dan akan tetap dibina oleh Kementerian. Djalan2 demikian dikenal dengan nama "Djalan Negara" dan djalan jang diserahkan disebut "Djalan Propinsi". Penjerahan ke-otonomi bawahan (Kabupaten) mengakibatkan timbulnja "Djalan Kabupaten". Disamping itu ada "djalan2 Kotapradja" jang dibina oleh daerah otonomi kotapradja.

Mengenai gedung2 dapat ditjatat bahwa jang diserahkan pada Propinsi hanja urusan sekolah2 Rakjat dan keperluan djawatan2 atau Dines Propinsi lainnja. Pembinaan2 gedung2 negara lainnja masih dipertanggung-djawabkan kepada Kem. P.U.T.. Dibeberapa kota besar di Djawa untuk urusan ini dibentuk Djaw. Gedung2 (Djakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Djokjakarta, Surakarta, Surabaja dan Malang) jang berada langsung dibawah Djaw. Gedung2/Kem. P.U.T..

/Mengenai ...

Mengenai pengairan hanja ditjatat bahwa usaha2 dibidang pengairan jang meliputi areal besar dipertanggungjawabkan ke Kem. P.U.T./Djaw. Pengairan. Pada waktu itu diambil sebagai antjar2 areal 10.000 ha, dibawah areal tsb. diserahkan pada Propinsi. Angka2 ini hanja dapat diperlakukan untuk Djawa, di-daerah2 luar Djawa dimana belum terdapat banjak pengairan2 technisch, angka2 itu djauh lebih ketjil. Penjerahan sebagian dari kekuasaan Kem. P.U.T. kepada Propinsi ini baru diresmikan dengan P.P. 18/1953.

✓ Kegiatan P.U. didaerah dibidang organisasi meliputi penjeragaman dengan organisasi daerah di Djawa jang sudah terdahulu mempunjai organisasi P.U. Propinsi dan P.U. Kabupaten.

Penjesuaian ini meliputi pengoperan organisasi N.I.T. diwilajah Indonesia bagian Timur pembentukan Dines2 P.U. Propinsi baru dan usaha2 pengadaan organisasi P.U. daerah ototoom bawahan (Kabupaten). Usaha2 ini melihat luas pekerdjaan dan djumlah tenaga tidak/belum merata dapat direaliseer.

Sebagai pedoman standard dari organisasi P.U. Propinsi pada waktu itu ditetapkan, Dines P.U. Propinsi membawahi P.U. Daerah dan P.U. Daerah membawahi P.U. Seksi.

Gerakan2 daerah serta pertumbuhan pemerintahan otonoom daerah jang telah mengakibatkan tumbuhnja propinsi2 baru, membawa konsekwensi dibentuknja Dines2 P.U. Propinsi di propinsi2 tersebut.

Beberapa Dines P.U. Propinsi bentuk lama dipetjah dengan mendjadikan Dines P.U. Daerah mendjadi Dines P.U. Propinsi.

/Hal ...

Hal ini telah terdjadi di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, di Sumatera Selatan, di Sulawesi, Kalimantan dan Nusatenggara. Di Kalimantan pernah pula diadakan djabatn koordinator Dines2 P.U. Kalimantan.

Diwilajah Irian Barat, sebelum termasuk kedalam wilajah R.I., diadakan Dines P.U. Propinsi (darurat) di Soa Siu (Maluku), kemudian urusan P.U. diatur oleh Departemen Dalam Negeri dan setelah resmi mendjadi wilajah R.I. dines P.U. Propinsi masuk lagi kedalam lingkungan pengawasan Departemen P.U.T.L..

✓ Organisasi Dines2 P.U. di Propinsi jang sebelumnya disamping dibawahi oleh Gubernur djuga dibawahi oleh satu Kem., pada djaman "Kabinet 100 Menteri" dibawahi oleh 3 Departemen (Bina Marga, Tjipta Karya dan Peng.Dasar). Di Prop. Djawa Timur Dines P.U. Prop. Djawa Timur telah dipetjah mendjadi 2, jaitu Dines Pengairan Prop.Djawa Timur dan Dines Bina Marga (Djalan2 dan Djembatan) Prop. Djawa Timur.

Departemen Djalan Raya Sumatera membentuk Perwakilan sendiri dibeberapa Prop. di Sumatera. Dep. Listrik dan Ketenagaan membagi wilajah kerdjanja dalam Exploitasi/Tjabang.

Organisasi Kem. P.U.T. di Pusat Djakarta dalam phase ini mengalami pula perobahan2 struktural, mengikuti policy serta perobahan susunan Pemerintah/Kabinet. Perobahan2 tsb. dapat digambarkan/disimpulkan sbb.:

✓ Pada tahun 1955 beberapa Djawatan didjadikan Direktorat Djenderal (Direktorat Djenderal P.U., Direktorat Djenderal Pengairan dan Direktorat Djenderal Gedung2). Disekitar tahun tersebut diatas pimpinan Kem. P.U.T. pernah dipegang oleh tenaga2 non-teknisch.

/Pada ...

Pada tahun 1959 setelah ada Dekrit Presiden untuk kembali ke U.U.D. tahun 1945, maka diadakan jabatan Menteri Muda Pekerjaan Umum yang dibawah oleh Menteri Inti dibidang Produksi dalam kabinet Presidentieel Kab. "Kerdja". Pada saat itu berdasarkan suatu surat Edaran Pemerintah nama Kementerian diganti dengan Departemen. Dalam penggabungan Dep2. nama Kem. masih dipakai.

Struktur Dep. mengalami perobahan2. Menteri dibantu oleh Staf Pembantu Menteri, Biro Menteri dan membawahi Djawatan2 dan org2. lain.,

Staf Pembantu Menteri terdiri dari :

1. Sekretaris Djenderal.
2. Direktur Djenderal P.U..
3. " " Perairan.
4. " " Perumahan.
5. " " Tugas2 khusus.

Biro Menteri terdiri dari :

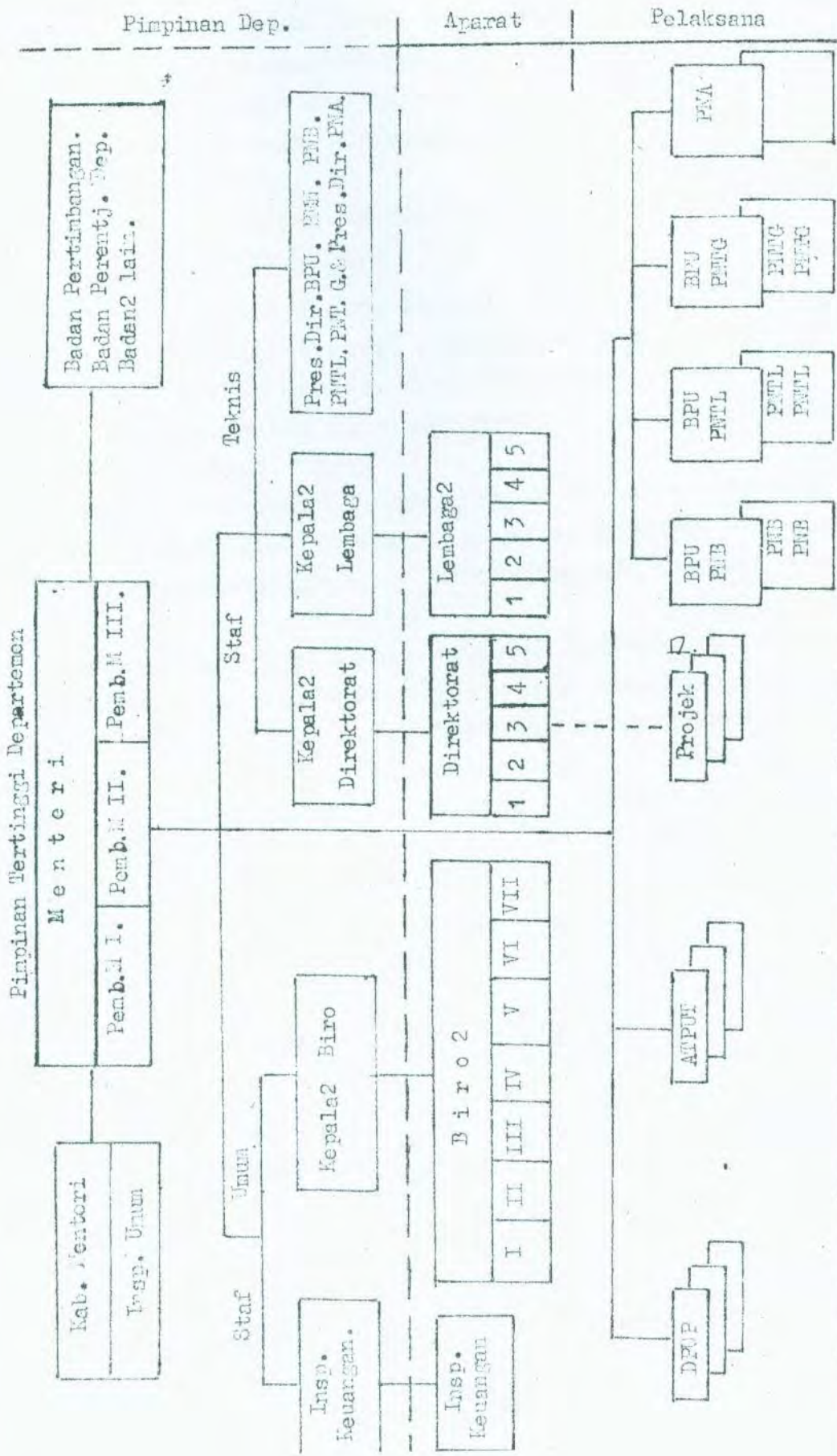
1. Sekretaris.
2. Bagian Hubungan Luar Negeri.
3. " Pendidikan.
4. " Hukum Per-undang2-an.
5. " Penjaluran Bahan Bangunan.
6. " Ketenagaan.
7. " Keuangan.
8. " Pegawai.
9. " U m u m.

Djawatan2 dan Organisasi2 lain terdiri dari :

1. Djawatan Djalan2 dan Djembatan.
2. " Perairan.
3. " Teknik Penjehatan.
4. " Gedung2 Negara.
5. " Perumahan Rakjat.
6. " Alat2 Besar. ✓

/7. Balai ...

Susunan Organisasi Dep. P.U.F.. Peraturan M. no. 5/PRF/1964. ✓



- = garis wewenang / Komando dari Pimpinan Tertinggi / Pemberian tanggung djawab dari Pimpinan Tertinggi.
 -- " " " / Pertanggungjangan djawab jang bersifat Managerial Teknis.

7. Balai Penjelidikan Tanah & Djalan.
8. " Penjelidikan Masalah Air, Bendungan2 besar, Hydrologie dan hydrometrie.
9. " Tata Ruangan & Pembangunan kota.
10. " Konstruksi.
11. Lembaga Penjelidikan Masalah Bangunan.
12. Perusahaan Listrik Negara.

✗ Pada tahun 1960 djabatan Menteri Muda Pek.Umum dan Tenaga didjadikan lagi Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, tetap dibawahi oleh Menteri Inti Produksi.

Djabatan Sek.Djenderal dipetjah mendjadi 2, jaitu Pembantu Utama I dan Pemb. Utama II.

Pada waktu itu sebagian urusan jang mendjadi wewenang dari Dep.Pek.Umum, ikut diatur oleh suatu komando jang diketuai oleh Menteri Produksi jaitu "Komando Operasi Makmur".

Terhadap semua perusahaan bangunan Belanda, terdjadi nasionalisasi dan didjadikan perusahaan Bangunan Negara (P.B.N.) dibawah suatu B.P.U. (Badan Pimpinan Umum) dilingkungan Dep. P.U.T.. Perusahaan2 itu diberi nama baru, dengan istilah "Karya". Diantaranja "Hutama Karya" untuk H.B.M. (Hollandse Beton Maatschappij), "Nindya Karya" untuk NEDAM (Nederl. Aannemings Maatschappij) "Waskita Karya" untuk Volker Aannemings Maatschappij dll..

Ditahun-tahun berikutnja pembentukan P.B.N./Karya2 ini diperluas dengan didjadikan Djaw.Alat2 Besar mendjadi "Nabuka Karya" dan pembentukan Karya lainnja ("Buwana Karya" dll.).

Pada tahun 1962 Dep. P.U.T. dibawahi oleh Wkl. Menteri dibidang Produksi. ✓

/Buat ...

Buat pertama kali djabatatan Menteri P.U.T. dipegang langsung oleh anggota Tentara (Djenderal A.D.). Mulai saat itu struktur intern Dep. P.U.T. mengalami perobahan2, dalam mana unsur2 organisasi Militer mulai diperlakukan dilingkungan Dep. P.U.T..

Beberapa djabatatan Direktur Djenderal baru, dengan dibantu oleh Assisten2, dibentuk, diantaranya :

1. Direktur Djenderal Personeel.
2. " " Operation (Pembangunan).
3. " " Urusan Umum.
4. " " Logistik.

Djabatatan Pemb. Utama I dan II didjadikan lagi Sekretaris Djenderal Perentjanaan dan Sekr.Djen.Pelaksanaan. Disamping itu diadakan djabatatan Inspektur Wilayah Kalimantan dan Inspektur Wilayah Timur. Beberapa djabatatan2 Direkt. Djenderal terdahulu didjadikan lagi Djawatan.

Dalam Kab. Kerdja tahun 1963 dan Kab. Dwikora tahun 1964 Dep. P.U.T. dibawahi oleh suatu Kompartemen, jaitu Kompartemen Pembangunan jang dikepalai oleh seorang Menteri Koordinator (Menko). Struktur Dep. diperintji lagi dan dibagi atas Pimpinan Departemen, Aparat dan Pe.aksana. Menteri dibantu oleh 3 Pemb.Menteri, (Pemb. M I, Bidang Ketenagaan dan Perairan serta Urs. Perusahaan Negara, Pemb.M II, Bidang djalan2 serta Urs.Angg.Bel., Pemb. M III, Bidang Ta-ta Bangunan, Tehn.Penjehatan Pemb.Tenaga serta Urs. Perentjanaan) dan mempunjai Staf Umum dan Staf Tehnis. Disamping itu Menteri dibantu oleh Bd.Pertimbangan, Bd.Perentj. Dep. dan Insp. Umum.

Staf Umum terdiri dari Inspektur Keuangan, Kepala2 Biro dan Staf Technis terdiri dari Kepala2 Direktorat, Kepala2 Lembaga dan Presiden Dir. dari B.P.U.-P.B.N., dan dari perusahaan2 negara lainnja.

/Djabatatan ...

Djabatan Direktorat2 diberikan pada Djawatan2 terdahulu.
Diantaranja terdapat :

1. Direktorat Perairan.
2. " Djalan Umum.
3. " Teknik Penjehatan.
4. " Ketenagaan.
5. " Bangun2-an.

Diantara lembaga2 terdapat :

1. Lembaga Penyelidikan masalah air, Hydrologie, Hydro-
metrie.
2. " " " Tanah/Djalan.
3. " " " Bangunan.
4. " " " Ketenagaan.
5. " " " Beton/Konstruksi.

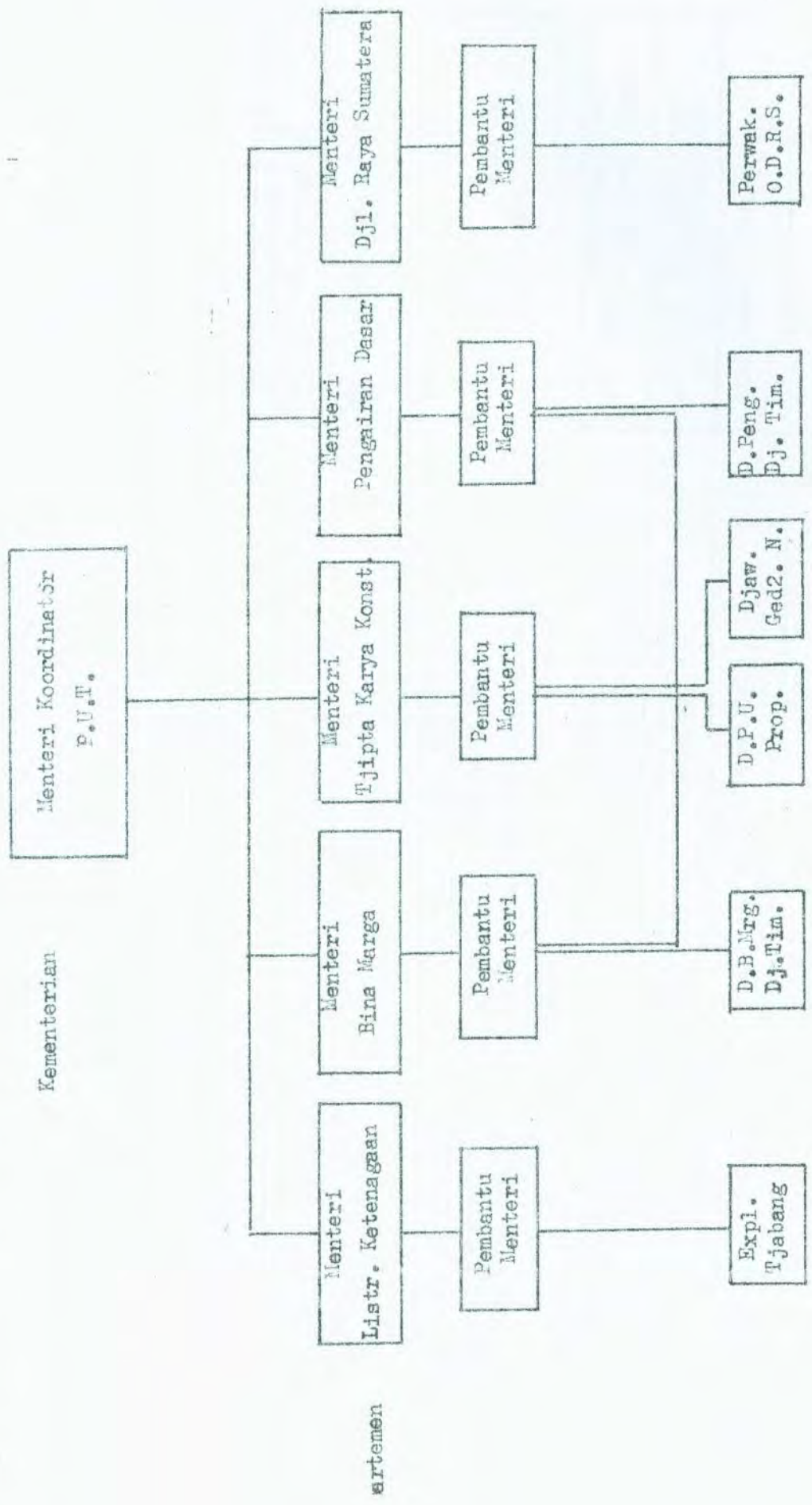
Suatu usaha jang erat hubungannja dengan tugas2 P.U.T. ialah pembentukan suatu badan Hukum O.D.R.S. (Otorita Djalan Raya Sumatera) jang diberi tugas membangun djalan poros, Utara - Selatan di Sumatera dan mempunjai wewenang mentjari dana untuk ini.

Pada tahun 1965 susunan Kabinet Dwikora disempurnakan dan Dep. P.U.T. dikeluarkan dari Kompartemen Pmbangunan, ditingkatkan mendjadi Kompartemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan dipetjah mendjadi 5 Departemen, dengan meningkatkan beberapa Direkt2. mendjadi Departemen, jaitu :

1. Dep. Listrik dan Ketenagaan.
2. " Bina Marga.
3. " Tjipta Karya dan Konstruksi.
4. " Pengairan Dasar.
5. " Djalan Raya Sumatera.

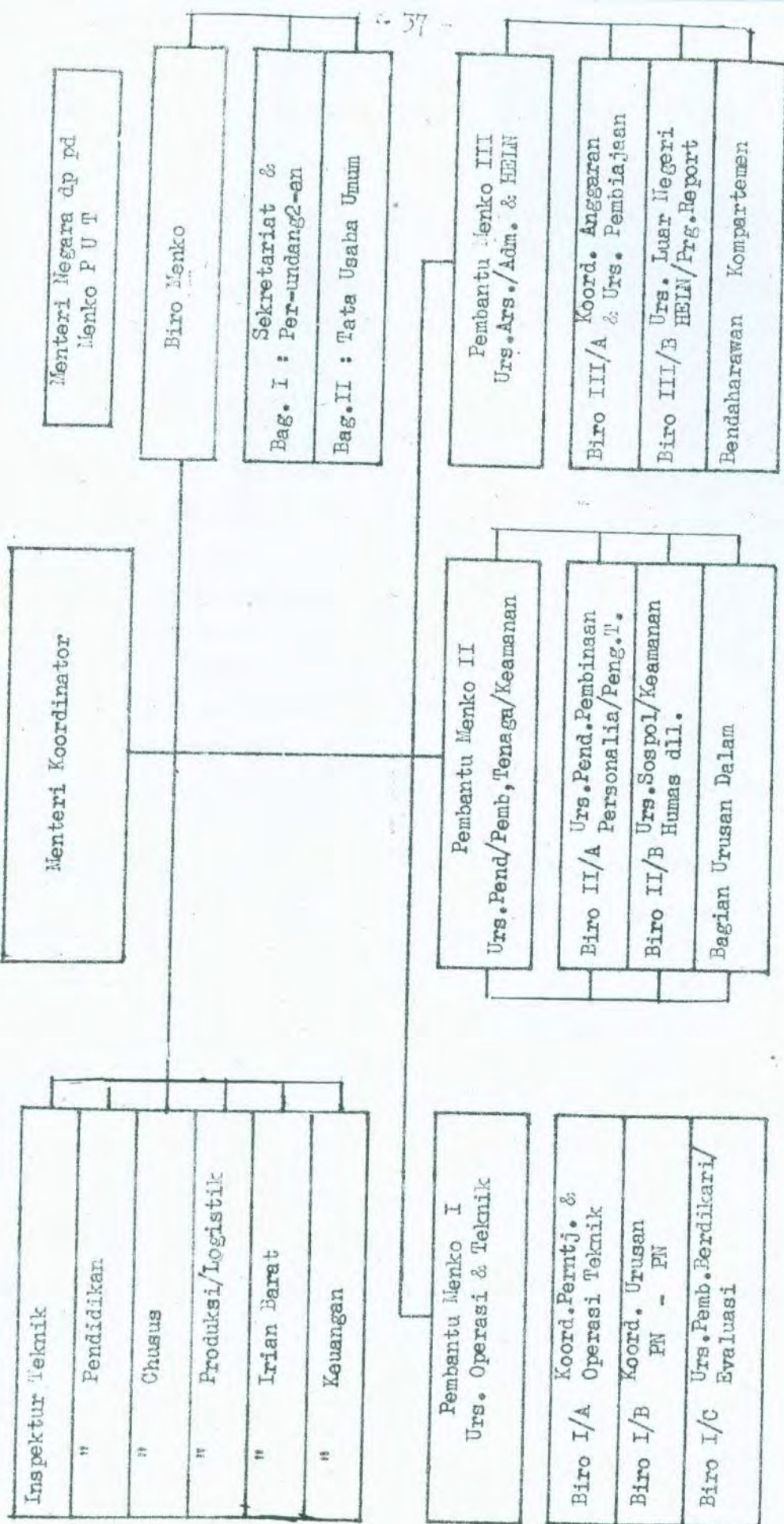
Istilah2 baru "Bina Marga" dan "Tjipta Karya" menggantikan istilah2 lama Djalan2/Djembatan dan Gedung2. Masing2 Dep. dikepalai oleh seorang Menteri jang mempunjai beberapa Pembantu Menteri.

/Diantara ...



Susunan Organisasi Kem.P.U.T.
Peraturan Menko P U T No. 1/1965.

KL



Diantara djabatana2 lain jang ada hubunganna dengan soal2 P.U. dapat ditjatat adanja Dep. Pengairan Rakjat dibawah Kompartemen Pertanian dan Agraria dan adanja djabatana Menteri Negara diperbantukan pada Menko P.U.T. untuk urusan penilaian konstruksi.

Staf Menko P.U.T. terdiri dari :

- a. Pembantu Menko I urusan Operasi & Teknik.
- b. " " II " Pend./Perum., Tenaga/Keamanan.
- c. " " III " Org./Adm.& Hub.Ek.Luar Negeri.
- d. Inspektur Teknik.
- e. " Pendidikan.
- f. " Khusus.
- g. " Produksi/Logistik.
- h. " Irian Barat.
- i. " Keuangan.
- j. Menteri Negara dp. pada Menko PUT urusan penilaian konstruksi.

Pada umumnja djabatana2 tsb. belum terisi seluruhnja.

Pada tahun 1966 susunan Kabinet Dwikora disempurnakan lagi. Kompartemen P.U.T. didjadikan lagi Kem. P.U.T. jang dibawahi oleh Djabatana Wkl. Perdana Menteri di idang Ekonomi dan Pembangunan.

Kem. P.U.T. waktu itu terdiri atas 4 Dep., masing2 dikepalai oleh seorang Deputy Menteri, jaitu :

1. Dep. Listrik dan Tenaga.
2. " Bina Marga.
3. " Pengairan.
4. " Tjipta Karya dan Konstruksi.

Dep. Djalan Raya Sumatera dimasukkan dalam suatu Komenterian baru jaitu Kem. Pembangunan Projek2 Mandataris. ✓

/Disamping ...

Disamping itu untuk pembangunan suatu complex gedung2 jang waktu itu direntjanakan untuk "Conference of the New Emerging Forces" (Conefo) dibentuk suatu komando "Koppronef" (Komando Pembangunan Projek Conefo) jang ditingkatkan menjadi suatu Departemen jang dirangkap oleh Menteri P.U.T.. Dalam Kabinet "Ampera" dalam mana nama Kementerian ditiadakan dan diganti dengan Dep. dan djumlahnja diperketjil, Dep. P.U. dibawah oleh djabatan Menteri Utama bidang Industri dan Pembangunan (Menutama bidang Inbang). Listrik dan Ketenagaan dimasukkan dalam Dep. lain jaitu Dep. Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga jang djuga berada dibawah Menutama Inbang.

✓ Djabatan2 Dep. Bina Marga, Pengairan Dasar, Tjipta Karya dan Konstruksi dan Djalan Raya Sumatera didjadikan Direktorat2 Djenderal dibawah Dep. P.U.. Struktur intern Dep. P.U. disempurnakan, ditertibkan dan dapat disimpulkan sbb.:

Menteri adalah pimpinan Departemen.

Unsur pembantu pimpinan adalah Sekr.Djenderal jang membawahi Biro2.

Unsur Pengawasan adalah Inspekt.Djenderal jang membawahi Inspektorat2.

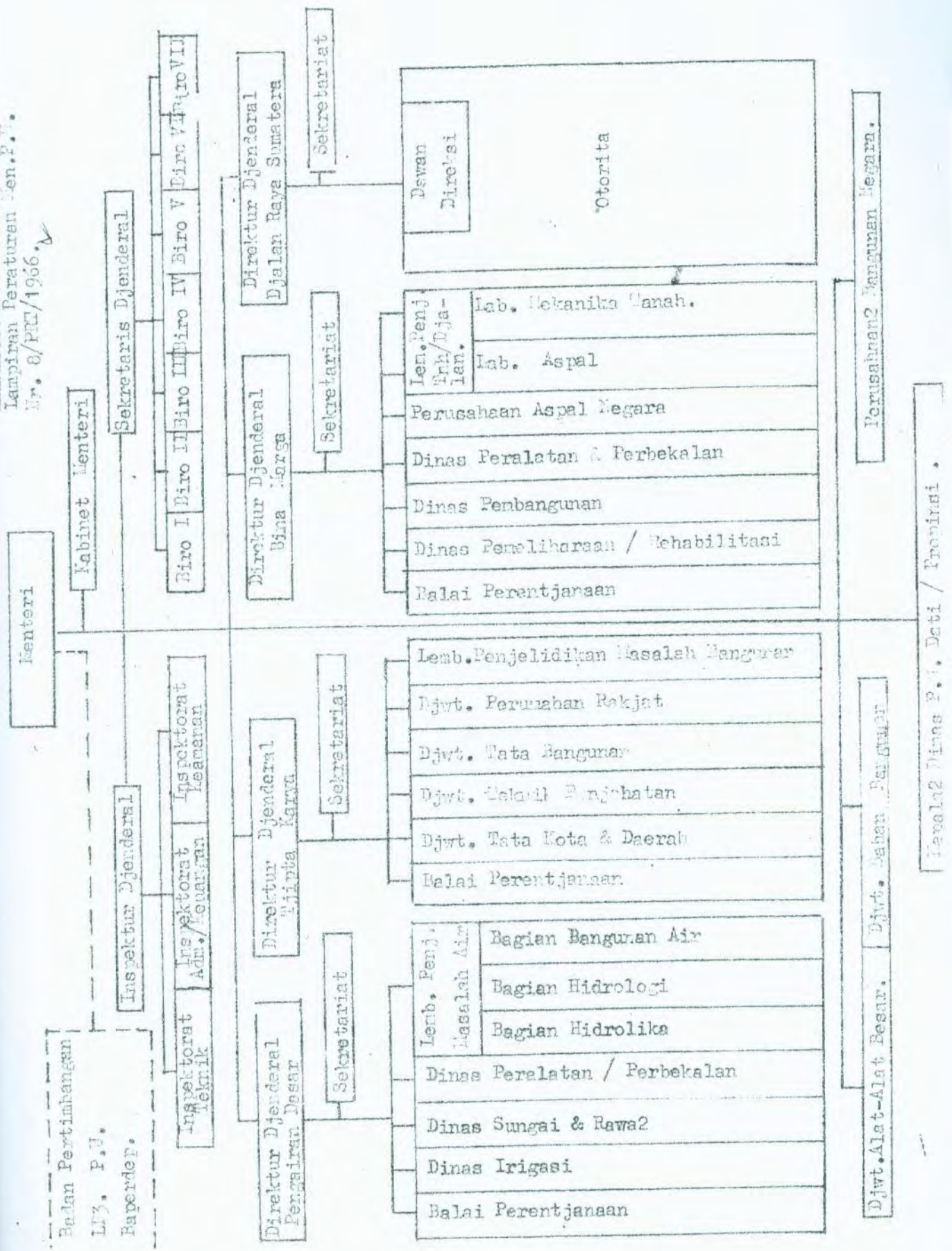
Unsur Pelaksana Utama adalah para Direkt. Djenderal serta Dines2 P.U. Propinsi.

Disamping itu terdapat unsur pelajanan (service element), jaitu Djaw.Alat2 Besar, Djaw.Bahan2 Bangunan, Perusahaan Bangunan Negara dan unsur penasehat jaitu badan2 khusus diantaranya Badan Pertimbangan, Badan Perantjang Dep. (Baperdep) Penasehat Menteri dll..

Buat pertama kali dalam struktur organisasi Dep. P.U. diadakan djabatan Inspektur Djenderal jang membawahi Inspektorat2 Teknik, Adm./Keuangan dan Keamanan.

/Sebelumnja ...

Departemen Pekerjaan Umum
Lampiran Peraturan Sen. P. U.
No. 8/PTK/1966.



Kevala2 Dinas P. U. Dati / Propinsi .

Sebelumnja fungsi ini dilakukan oleh badan Inspeksi jang dititik beratkan pada keuangan dan oleh tenaga2 diperbantukan sebagai Inspektur Wilayah/Teknik/Umum dan oleh Gewestelijke inspectie v/d Waterstaat didjaman kolonial Belanda.

Dalam tahun 1967 susunan Kabinet "Ampera" disempurnakan dengan meniadakan djabatan Menutama. Dep. P.U. berdiri sendiri dan urusan Listrik dan Tenaga termasuk dalam Dep. Perindustrian.

Pada waktu itu djumlah Direktorat Djenderal dilingkungan Dep. P.U. berkurang mendjadi 3 karena peleburan Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera mendjadi Projek Khusus Djalan Raya Sumatera dibawah Menteri P.U..

Pada tahun 1968 setelah terbentuk Kabinet "Pembangunan" maka urusan Listrik dan Tenaga dikeluarkan dari Dep. Perindustrian dan dimasukkan kembali mendjadi Direktorat Djenderal Tenaga Listrik dan Gas dilingkungan Dep. Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, disingkat Dep. P.U.T.L.. Struktur intern Dep. lebih disempurnakan lagi. Unsur pelajaran diperluas dengan adanja Projek2 Khusus, Inst. Pendidikan dan perobahan Djaw. mendjadi Expl. (Alat2 Besar, Bahan2 Bangunan). Disamping itu djumlah Badan2 pembantu Pimpinan khusus ditambah dengan Dewan Kepegawaian, Team Khusus Penertiban & Pembersihan Personil Dep. P.U.T.L. dll.

Mengenai tenaga2 (teknik), walaupun telah mulai ada lulusan2 dari perguruan2/institut2 pendidikan tehnik, kekurangan2 masih sangat terasa, terutama diluar Djawa. Untuk mengatasi ini Pem. memberikan bea-siswa2 untuk pelajaran diluar/dalam negeri. Disamping itu diterima pula bea-siswa2 dari pemerintah dan badan2 asing (AID., Colomboplan dll.).

/Kem. P.U.T. ...

Lampiran surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
 No. 7/PRN/1964
 tanggal 17 Juli 1964

Menteri

Sekretariat Jenderal

- Sekretariat Jenderal
- Biro VII Umum.
 - Biro VI Organisasi Per-Und. 2 & Humas.
 - Biro V Personalia/Organ.
 - Biro IV Keuangan
 - Biro III Perantj. & H.L.N.
 - Biro II Logistik
 - Biro I Teknik

Direktor Jenderal Peraga dan Listrik

- Sekretariat
- Projek-Projek
 - Distribusi
 - Distrik
 - Lembaga Masalah Ketenangan
 - Direktorat 2 Pembinaan & Pengusahaan Tenaga
 - Teknik & Pembangunan
 - Penelitian & Perentjanaan

Direktor Jenderal Bina Marga

- Sekretariat
- Projek-Projek
 - Perusahaan Aspal Negara
 - Lembaga Penelitian Masalah Jalan dan Jalar
 - Direktorat 2 Pembangunan Pemeliharaan & Rehabil.
 - Peralatan & Perbekalan
 - Eksplorasi Survey/Peren.

Inspektur Djenderal

- Inspekturat Djenderal
- Inspektorat Keamanan
 - Inspektorat Admin./Keuangan
 - Inspektorat Teknik

Direktor Djenderal Ejaipda Karya

- Sekretariat
- Projek-Projek
 - Lembaga Penelitian Masalah Bangunan
 - Teknik
 - Penjehatan
 - Direktorat 2 Tata Kota & Daerah
 - Tata Bangunan
 - Perumahan Rakyat

Direktor Djenderal Pengaliran Dasar

- Sekretariat
- Projek-Projek
 - Lembaga Penelitian Masalah Air
 - Direktorat 2 Irigasi
 - Sungai & Rawa
 - Peralatan & Perbekalan
 - Eksplorasi, Survey & Perentjanaan.

Belkansa
 Belkansa
 Belkansa (Service)
 Belkansa

Eksplotasi Alat2 Besar

Eksplotasi Bahan2 Bang.

Institut
 Pend.P.U.T.

Projek
 Chusus DRS.

Proj. Peng.
 Djetiluhur

Proj.Pers.
 Pasang-Surut

Bel.P.T.

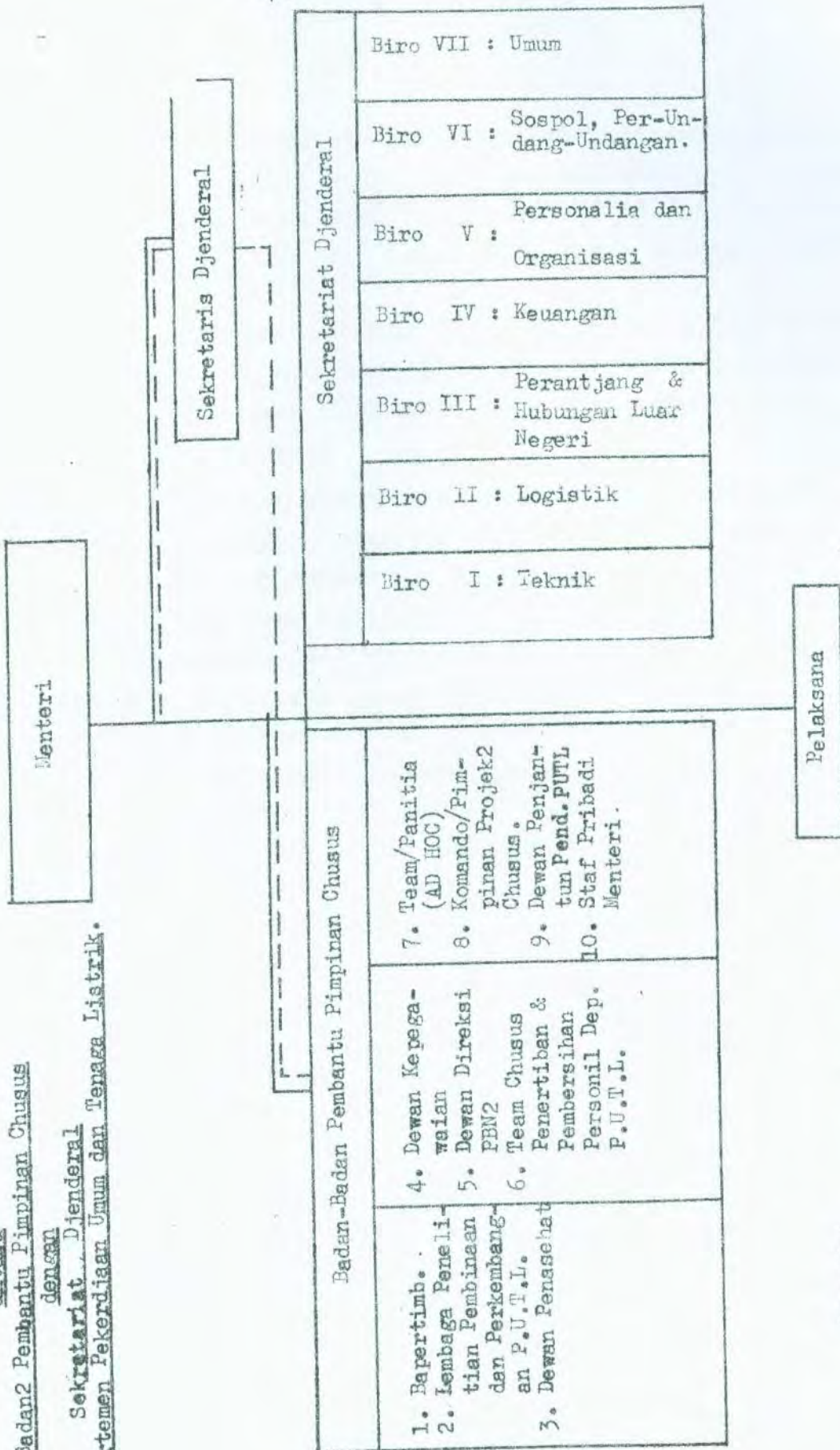
Dinas2 P.u. Dati I/Prinsipal

59

Bagan
Organisasi dan Hubungan Kerdiia
antara

Badan2 Pembantu Pimpinan Khusus
dencan

Sekretariat Djenderal
partemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.



Legenda:

- - - - - garis komando.
- - - - - garis fungsi staf.

Kem. P.U.T. pada waktu itu mulai mengadakan pendidikan2 intern P.U. baik untuk teknik rendah maupun menengah, jaitu kursus kader Tehnik di Djokja dan Lembaga Akademi Pendidikan Teknik di Bandung jang kemudian bernama Akademi Teknik P.U.T..

Djumlah kursus kader kemudian diperbanyak dan ditambah dengan kursus2 Keuangan/Bendaharawan. Untuk didikan tenaga staf/pimpinan ditahun 1968 diadakan Sekolah Staf P.U.T. (Sespput) jang pertama.

Mengenai tambahan tenaga pada umumnja dapat ditjatat, bahwa setelah terdjadi nasionalisasi atas perusahaan2 bangunan Belanda, semendjak thn. 1960 anggota2 Angk.Darat/Angk.bersendjata baik technisch maupun adm. ditugaskan pada instansi2 sipil, pada Dep. P.U.T. dengan istilah golongan "Karya" dari Angk. jang bersangkutan.

√ Semendjak R.I. membenarkan pegawai Negeri mendjadi anggota sesuatu party politik, maka dalam phase ini djumlah pegawai P.U. jang mendjadi anggota party bertambah. Kemudian terdjadi larangan untuk golongan tertentu (gol.F/PGPN), tetapi achirnja dibenarkan lagi.

Disamping itu organisasi serta gerakan perburuhan dilingkungan P.U. mulai pula berkembang dengan pesatnja, mengikuti perkembangan gerakan perburuhan nasional.

Pada waktu itu timbul organisasi2 serta gabungan2 organisasi perburuhan baru jang memperlihatkan aliran serta tjoraknja.

Ada jang beraliran politik, mendjadi onderbouw dari suatu party, ada jang bertjorak ke-agamaan dengan/tanpa mendjadi onderbouw dari partij politik/agama, ada jang tidak termasuk dalam kedua golongan2 tsb./berafiliasi dengan sesuatu partij.

/Diantara ... X

Diantara nama2 organisasi2 tsb. dapat ditjatat :

- a. S.B.P.U., S.B.L.G., S.O.B.S.I. (Serikat Buruh Pek.Umum, Serikat Buruh Listrik dan Gas, Sentral Org.Buruh Seluruh Indonesia).
 - b. K.B.P.U./K.B.M., F.M. (Kesatuan Buruh Pembangunan Umum/ Kesatuan Buruh Marhaen, Front Marhaen).
 - c. Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia).
 - d. Kespekri (Kesatuan Pekerdja Kristen Indonesia).
 - e. S.B.P.U.T./Gasbiindo (Serikat Buruh P.U.T./Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia).
 - f. S.B.D.P.U./K.B.K.I. (Serikat Buruh Djaw. P.U./Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia).
 - g. Konkarbu/Soksi (Konsentrasi Karyawan dan buruh/Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia).
- Sewaktu timbul peristiwa G.30.S./P.K.I., maka organisasi2 S.B.P.U./S.B.L.G. dan S.O.B.S.I. ditiadakan/dilarang.

✓ Anggaran Belandja dilingkungan P.U.T. semula diatur centraal oleh Kem. P.U.T. untuk objek2 negara dan melalui Kem. Dalam Negeri untuk objek2 Propinsi. Penjaluran uang mengikuti ketentuan2/perubahan2 jang dikeluarkan oleh Kem.Keuangan, jang pernah dipetjah dalam beberapa Kementerian/Departemen, dan oleh Pemerintah Otonoom propinsi. Pernah uang kerdja ditahun 1961 - 1965 disalurkan melalui Bank Pembangunan Indonesia. Mengikuti pula perkembangan serta kegiatan2 dari pelbagai Departemen dan Pemerintah Daerah pembiajaan2 untuk pekerdjaan2 jang biasanja dimasukkan dalam wewenang P.U. dilakukan oleh instansi2 lain oleh Angk.Bersendjata, (djalan2/djembatan) oleh Dep. Sosial (bentjana alam).

/Disamping ...

Disamping itu dapat ditjatat pembiajaan2 oleh daerah2 dari export hasil daerah, dari A.D.O. (Alokasi Devisa Otomatis) dari Pampasan Perang (Djepang), dari grant (hadiah), kredit2 luar negeri baik langsung dari negara Asing, maupun melalui org2. international. Diantaranja dapat disebut dana I.C.A./A.I.D., S.A.C., I.D.A. (International Cooperation Administration/Agency for International Development, Surplus Agricultural Commodities, International Development Association) dari Amerika Serikat, Kredit von Merkatz dari Djerman Barat, Kredit Luns dari Nederland, dana Colomboplan, kredit2 dari Djerman Timur, Jugoslavia, Uni Sovjet, kredit2 dari World Bank/I.B.R.D.(International Bank for Re-construction and Development), melalui U.N.D.P. (United Nations Development Program) dll..

- Dalam pelaksanaan pekerdjaan2 semula dapat diikuti norma2, pemisahan tugas dari instansi2 pemerintah serta ketentuan sebelum perang, tetapi lambat-laun hal ini tidak dapat dipertahankan lagi.
- Tugas jang dikenal selama ini sebagai tugas P.U. mulai dilakukan oleh instansi2/Dep2. lain. Pembangunan gedung2 dilakukan oleh instansi2/Dep. sendiri2. Fungsi P.U. selaku "Wegbeheerder" tidak dipegang t.aruh lagi. Ikut sertanja Angk.Bersendjata dalam pembangunan Nasional (Civic Mission Abri) mengakibatkan pembangunan/pembinaan djalan2 dan pembangunan2 lainnja ikut diselenggarakan oleh Angkatan Bersendjata/Zeni. Rupa2 badan dan komando ditjiptakan diantaranya Bakopda (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah), Kopan (Komando Operasi Harapan), Kopelohan (Komando Pelaksana Operasi Harapan), Kopreda (Komando Rehabilitasi Daerah) dll..

/Kekurangan ...

Kekurangan Anggaran Belandja telah mengakibatkan meluas-
nja pengerahan tenaga rakjat atau gotong-rojong.
Di-propinsi2 oleh beberapa Gub. dilakukan perobahan2 da-
ri struktur organisasi dari Dines P.U. Propinsi/Dines
P.U. Kabupaten, ada pula dibentuk Biro Pembangunan dan
Badan/Direksi pembangunan dilingkungan Kantor Gubernur.
Dengan berlakunja dalam organisasi, Dep. P.U.T. bahwa
Direktur2 Djenderal mendjadi unsur pelaksana, maka di-
daerah2 otonoom propinsi terdapat badan2 pelaksana/pro-
jek2 jang hierarchisch langsung berada dibawah Dep.,
cq. Direktorat Djenderal jang bersangkutan. Hubungan da-
ri projek2 ini dengan Dines P.U. Propinsi semula tidak
ada, kemudian bersifat koordinatip sadja.-